

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN FUNDAMENTAL**



**MODEL NERACA DAYA SAING DAERAH BERBASIS  
INDEKS PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN**

**Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun**

**Oleh:**

<b>Dr. AMIN PUJIATI, S.E., M.Si</b>	<b>NIDN 0021086904</b>
<b>PRASETYO ARI BOWO, S.E., M.Si</b>	<b>NIDN 0008027905</b>
<b>DYAH MAYA NIHAYAH, S.E., M.Si.</b>	<b>NIDN 0002057709</b>

**Dibiayai oleh:**

**Dibiayai oleh:**  
**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat**  
**Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan**  
**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**  
**Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017**  
**Nomor: 084/SP2H/LT/DRPM/IV/2016, Tanggal 11 April 2017**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**OKTOBER 2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

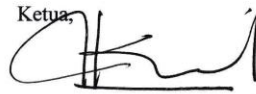
Judul : Model Neraca Daya Saing Daerah Berbasis Indeks  
Pembangunan Kota Berkelanjutan

Peneliti/Pelaksana  
Nama Lengkap : Dr.Amin Pujiati, S.E., M.Si  
NIDN : 0021086904  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Nomor HP : 08156622997  
Alamat surel(e-mail) : [amin.pujiati@gmail.com](mailto:amin.pujiati@gmail.com)

Anggota (1)  
Nama Lengkap : Prasetyo Ari Bowo, S.E, M.Si  
NIDN : 0008027905  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang  
Anggota (2)  
Nama Lengkap : Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si  
NIDN : 0002057709  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang  
Institusi Mitra (jika ada) :-  
Nama Institusi Mitra :-  
Alamat :-  
Penanggung Jawab :-  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 83.629.000,00  
Biaya Keseluruhan : Rp. 133.629.000,00

Semarang, 13 Oktober 2017

  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi,  
Dr. Wahyono, M.M  
NIP.195601031983121001

Ketua,  
  
Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si  
NIP. 196908212006042001

  
Menyetujui  
Ketua LP2M,  
Prof.Dr. Totok Sumaryanto F, M.Pd  
NIP.196410271991021001

## RINGKASAN

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun regional. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Untuk itu perlu ada identifikasi faktor keunggulan dan kelemahan daerah berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan agar memiliki daya saing baik secara internal maupun eksternal. Tujuan studi ini adalah menyusun neraca daya saing daerah berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan serta merumuskan kebijakan atas dasar hasil analisis neraca daya saing daerah berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan di wilayah metropolitan Semarang sebanyak enam kabupaten/kota yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari BPS dan Pemerintah kota tahun 2010 sampai dengan 2016. Metode analisis yang digunakan adalah indeks komposit dan deskriptif. Hasil neraca daya saing dari sisi keunggulan adalah variabel tata kelola kota, urbanisasi dan kependudukan, ekonomi lokal dan sektor informal, dari sisi kelemahan adalah kepemimpinan, perumahan dan pemukiman, kawasan tepi air, transportasi masal, pelestarian warisan budaya, pusaka dan kearifan lokal serta ruang terbuka hijau emisi dan energi. Kebijakan untuk merumuskan kota yang berkelanjutan diprioritaskan pada faktor kelemahan yang ada untuk dapat berdaya saing.

Kata kunci: *model, daya saing, indeks, pembangunan, kota, berkelanjutan*

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan limpahan rahmat dan ridho-Nya akhirnya penulis bisa menyelesaikan laporan kemajuan penelitian Fundamental ini yang berjudul **“MODEL NERACA DAYA SAING DAERAH BERBASIS INDEKS PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN”**

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui lembaran ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth :

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan dan mendukung penelitian.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah memberikan kesempatan dan mendukung penelitian.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah yang telah memberikan kesempatan dan mendukung penelitian.
4. Dr.Wara Dyah Pita Rengga, S.T., M.T dan Dr.Ir. Subiyanto, S.T., M.T selaku Evaluator yang telah banyak memberikan masukan dalam penelitian.
5. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih atas dukungan dan bantuan.

Hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan. Untuk itu, kritik dan saran penting agar dikemudian hari menjadi lebih baik.

Semarang, Oktober 2017

Peneliti

## DAFTAR ISI

	hal
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>RINGKASAN</b> .....	iii
<b>PRAKATA</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Urgensi Penelitian .....	3
1.4 Luaran Penelitian .....	4
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
2.1 <i>State of the art</i> .....	5
2.2 Studi pendahuluan dan Peta Jalan Penelitian .....	7
<b>BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b> .....	<b>8</b>
3.1 Tujuan Penelitian.....	8
3.2 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB IV : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>9</b>
4.1 Tipe Penelitian.....	9
4.2 Obyek Penelitian.....	9
4.3 Jenis dan Sumber Data.....	9
4.4 Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	10
4.5 Metode Analisis .....	11
4.6 Bagan Penelitian .....	11
<b>BAB V : HASIL YANG DICAPAI</b> .....	<b>12</b>
5.1 Konsep dan Pengertian Neraca Daya Saing .....	12

5.2 Pemeringkatan Daya Saing Kabupaten/Kota	
Berdasarkan Variabel .....	14
5.3 Pemeringkatan Daya Saing Daerah Berdasarkan	
Indikator.....	18
5.4 Neraca Daya Saing Berdasarkan Advantage	
dan Disadvantage.....	62
5.5 Kebijakan atas Dasar Hasil Analisis Neraca Daya	
Saing Daerah.....	84
<b>BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian-penelitian Sebelumnya.....	5
Tabel 4.1	Masalah, Metode dan Output.....	11
Tabel 5.1	Peringkat Kabupaten/kota Berdasarkan Indeks Pembangunan Kota Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Semarang.....	12
Tabel 5.2	Variabel Utama dan indikator.....	15
Tabel 5.3	Variabel Penunjang dan Indikator.....	16
Tabel 5.4	Pemeringkatan Kabupaten/kota Berdasarkan Variabel yang Digunakan.....	18
Tabel 5.5	Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Kepemimpinan Kota dan Persepsi Masyarakat.....	22
Tabel 5.6	Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Kepemimpinan Kota dan Data obyektif.....	24
Tabel 5.7	Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Tata kelola Kota dan Persepsi Masyarakat.....	28
Tabel 5.8	Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Tata Kelola Kota dan Data Obyektif.....	31
Tabel 5.9	Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan Indikator Urbanisasi dan Kependudukan Kota dan Persepsi Masyarakat.....	36
Tabel 5.10	Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Urbanisasi dan Kependudukan Kota dan Data Obyektif.....	39
Tabel 5.11	Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Perumahan dan Pemukiman	

dan Persepsi Masyarakat.....	43
Tabel 5.12 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Perumahan dan Pemukiman dan Data Obyektif.....	44
Tabel 5.13 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Resiko Bencana dan Perubahan Iklim dan Persepsi Masyarakat.....	45
Tabel 5.14 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Resiko Bencana dan Perubahan Iklim dan Data Obyektif.....	47
Tabel 5.15 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolita Semarang Berdasarkan Indikator Kawasan Tepi Air dan Persepsi Masyarakat.....	49
Tabel 5.16 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Kawasan Tepi Air dan Data Obyektif.....	50
Tabel 5.15 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Transportasi Masal dan Persepsi Masyarakat.....	52
Tabel 5.16 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Transportasi Masal dan Data Obyektif .....	53
Tabel 5.17 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Ekonomi Lokal dan Sektor Informal dan Persepsi Masyarakat.....	54
Tabel 5.18 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Ekonomi Lokal dan Sektor Informal dan Data Obyektif.....	55
Tabel 5.19 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka, Kearifan Lokal dan Persepsi Masyarakat.....	57



Tabel 5.20 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka, Kearifan Lokal dan Data Obyektif.....	59
Tabel 5.21 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi dan Persepsi Masyarakat.....	60
Tabel 5.22 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi dan Data Obyektif.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Roadmap Penelitian.....	7
Gambar 4.2 Bagan Penelitian.....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Berdasarkan proyeksi penduduk daerah perkotaan per provinsi di Indonesia dari tahun 2000-2025 akan mencapai 68 persen pada tahun 2025. Bahkan provinsi di Jawa dan Bali, tingkat urbanisasinya sudah lebih tinggi dari Indonesia secara total. Tingkat urbanisasi di empat provinsi di Jawa pada tahun 2025 sudah di atas 80 persen, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten (BPS, 2011). Urbanisasi pada skala global, menarik untuk dicatat munculnya beberapa kota mega (*mega cities*) atau aglomerasi perkotaan (*urban agglomeration*), demikian juga yang di Indonesia (BPS, 2010).

Pertumbuhan kota yang melebihi kapasitas perkotaan akan menimbulkan berbagai masalah baik ekonomi, sosial, budaya, politik maupun lingkungan. Berkaitan dengan lingkungan, pertumbuhan kota berpengaruh negatif terhadap lingkungan. Kesimpulan ini senada dengan hasil penelitian Cho *et al* (2007), Coles *et al* (2010), McCarthy *et al* (2010), Ahmad dan CHOI (2010), Todaro dan Smith (2006), Khatun (2009); Fan dan Qi (2010); Dutt (2009); Oleyar *et al* (2008), Ma *et al* (2008), Jiang dan Harde (2009), Zheng *et al* (2010). Fenomena dampak negatif pertumbuhan kota terhadap lingkungan pada umumnya terjadi karena hanya mengedepankan kepentingan jangka pendek dari sisi ekonomi. Hal ini sangat kontradiktif dengan tujuan pembangunan yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya dalam aspek ekonomi saja tetapi dalam segala aspek dan memperhatikan juga kepentingan jangka panjang.

Pembangunan yang memperhatikan kepentingan jangka panjang yang sering disebut sebagai pembangunan berkelanjutan harus memenuhi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Banyak bukti menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah implementasi dari kebijakan yang diambil. Oleh karena itulah perlu disiapkan suatu kondisi agar tujuan pembangunan berkelanjutan berhasil. Dalam hal ini kebijakan ataupun program tersebut mesti

mempertimbangkan baik dari sisi teknis dan non teknis agar mudah diimplementasikan.

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan demikian juga untuk pembangunan daerah (kabupaten/kota). Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kota, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Di samping itu, iklim globalisasi menuntut daerah harus mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kemampuan bersaing ini sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing dan kemampuan daerah dalam menetapkan kebijakan untuk meningkatkan saing perekonomian suatu daerah relatif terhadap daerah-daerah lainnya.

Melihat urgensinya pembangunan berkelanjutan dan daya saing daerah, maka perlu dilakukan penelitian dasar untuk menyusun model neraca faktor keunggulan (daya saing tinggi) dan kelemahan (daya saing rendah) berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan (*urban sustainable index*) sehingga di satu sisi tujuan pembangunan yang diharapkan dapat tercapai baik dari aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, lingkungan serta tetap memperhatikan kepentingan jangka panjang, di sisi lain kota yang berdaya saing juga tercapai. Pentingnya mencapai dua sisi tersebut, sesuai dengan hasil penelitian Cracolici *et al* (2010) yang menunjukkan performance suatu negara tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi dan sosial saja tapi perlu dilihat dari aspek lainnya yaitu lingkungan. Kebijakan berkaitan dengan lingkungan di negara berkembang menjadi *plus point* dalam mengukur performance pemerintah. Senada dengan itu, Roback (1982) dan Pujiati (2013a) menyimpulkan publikasi peneringkatan kota berdasarkan kualitas lingkungan sangat berguna sebagai sarana promosi.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan pada tahun kedua dan akan dilakukan di wilayah metropolitan Semarang. Pertimbangan dipilihnya wilayah metropolitan Semarang adalah wilayah metropolitan tersebut terletak di Pulau Jawa, Pulau tempat terkonsentrasinya penduduk Indonesia. Pertimbangan lainnya, wilayah metropolitan Semarang yang lebih dikenal dengan Kedungsapur

merupakan salah satu kawasan andalan di Provinsi Jawa Tengah yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sendiri maupun sekitarnya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan pokok masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian lanjutan ini adalah:

- a. Bagaimana neraca daya saing daerah berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan?
- b. Bagaimana rumusan kebijakan atas dasar hasil analisis neraca daya saing daerah berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan?

## **1.3 Urgensi Penelitian**

Pertumbuhan kota yang terus menerus yang melebihi kapasitas daya dukung geografis/ruang dan ekonomi perkotaan dan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya dari segi lingkungan. Hal ini bertentangan tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam segala aspek tidak hanya aspek ekonomi saja dan harus memperhatikan kepentingan masa yang akan datang tidak hanya kepentingan jangka pendek. Konsep pembangunan yang memperhatikan kepentingan masa yang akan datang atau disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu keharusan baik ditingkat nasional maupun daerah. Pembangunan berkelanjutan yaitu suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Era globalisasi setiap daerah harus mampu bersaing baik secara internal maupun eksternal. Setiap daerah harus mengetahui faktor-faktor keunggulan (daya saing tinggi) dan faktor-faktor kelemahan (daya saing rendah) sehingga dapat teridentifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan daerah dalam upaya meningkatkan daya saing masing-masing daerah. Untuk itu perlu disusun neraca daya saing daerah yang berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan. Neraca

daya saing daerah ini digunakan dasar merumuskan kebijakan dan program setiap daerah.

#### **1.4 Luaran Penelitian**

Adapun luaran penelitian ini adalah :

- a. Publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau internasional
- b. Model.
- c. Bahan Ajar

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 *State of the art*

Berikut ini dipaparkan hasil penelitian sebelumnya sebagai *state of the art* yang secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya

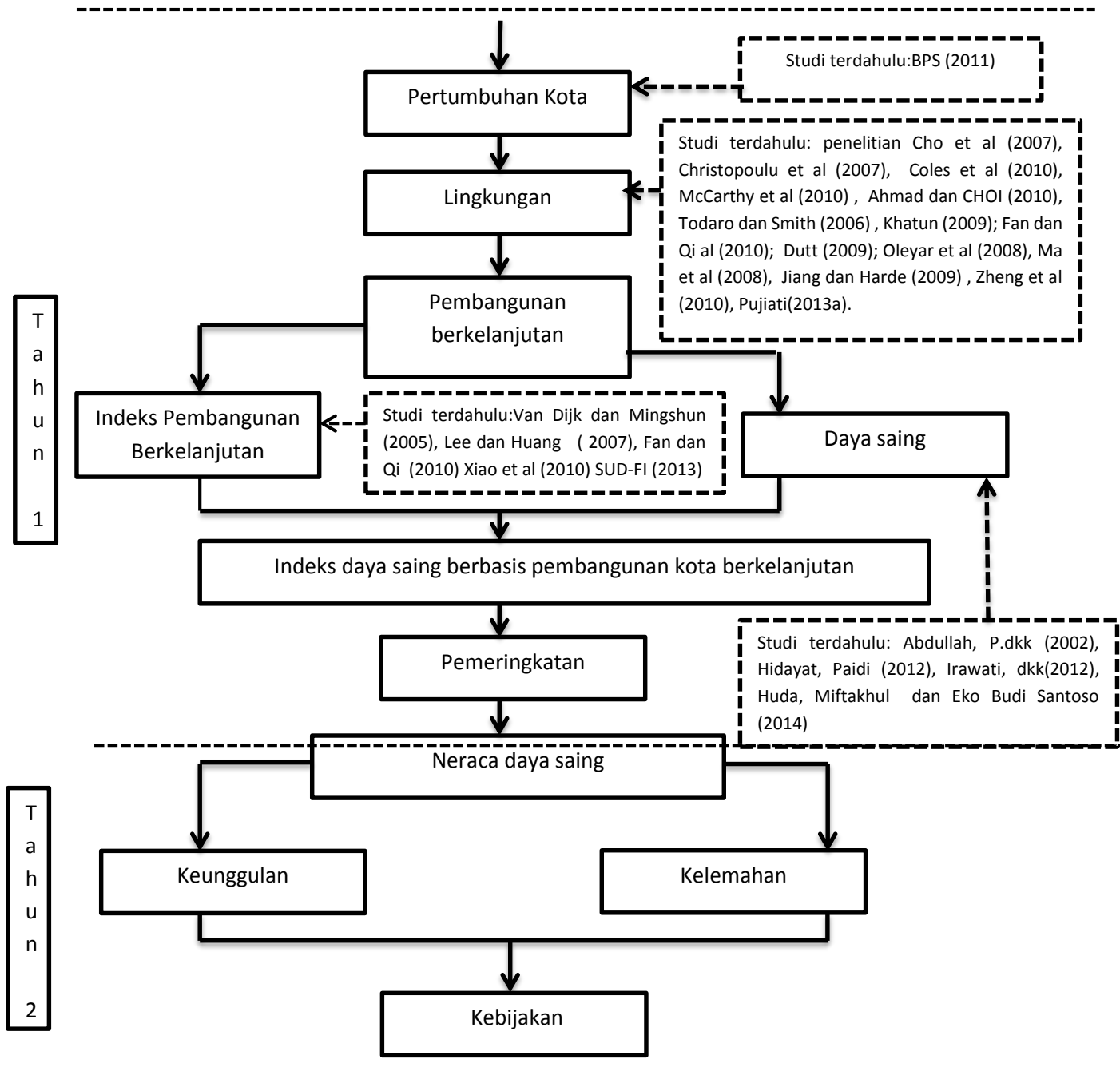
No	Peneliti	Obyek Penelitian	Metode	Variabel	Kesimpulan
1.	Van Dijk dan Mingshun (2005)	Keberlanjutan kota di Cina	AHP	Urban status index, Urban coordination index, Urban potential indexl	Ada tradeoff antara lingkungan dan ekonomi. Kondisi sosial mempunyai hubungan kuat dan positif terhadap keberlanjutan kota dibandingkan kondisi ekonomi. Pembangunan berkelanjutan masih rendah
2.	Lee dan Huang (2007)	Pembangunan berkelanjutan di Taipeh	urban sustainability index (USI)	Ekonomi , sosial, lingkungan,institusional	Taipeh menuju pembangunan yang berkelanjutan. Indikator sosial dan lingkungan menunjukkan peningkatan menuju pembangunan berkelanjutan, ekonomi dan institusi lebih lambat.
3.	Fan dan Qi (2010)	Hubungan antara urbanisasi dan lingkungan di 31 Provinsi di Cina	Korelasi , urban sustainability index (USI)	Urbanisasi,GDP per kapita,polusi udara,kebisingan suara,rasio pendapatan pedesaan dan perkotaan	Ada korelasi positif antara urbanisasi dan kerusakan lingkungan.Berjalannya waktu pembangunan ekonomi berdampak negatif terhadap lingkungan
4.	Xiao et al (2010)	performance kota berkelanjutan di Cina	urban sustainability index (USI)	kebutuhan dasar , efisiensi sumber daya, kebersihan lingkungan, lingkungan fisik dan komitmen keberlanjutan lingkungan.	Penentu performance kota yang berkelanjutan adalah komitmen keberlanjutan lingkungan..
5.	SUD-FI (2013)	Pengukuran indeks pembangunan kota berkelanjutan (SUD index)	Indeks komposit	Indikator utama : pemimpin kota, tata kelola kota, urbanisasi dan kependudukan, perumahan dan pemukiman. Indikator penunjang 1 : resiko bencana dan perubahan iklim, kawasan tepi air, transportasi masal.Indikator penunjang 2: ekonomi lokal dan sektor informal, pelestarian warisan budaya, pusaka alam dan kearifan lokal, ruang terbuka hijau, emisi dan energi	indikator utama akan menjadi indikator yang wajib dipenuhi oleh suatu kota atau kawasan perkotaan agar pembangunan yang sedang berlangsung dapat berkelanjutan, sedangkan indikator penunjang 1 dan indikator penunjang 2 dapat dipenuhi secara bertahap apabila indikator utama telah terpenuhi

No	Peneliti	Obyek Penelitian	Metode	Variabel	Kesimpulan
6.	Pujiati (2013)	Determinan kota hijau dan non hijau di aglomerasi Semarang dan Yogyakarta	Regresi logistik	PDRB kap, industri, populasi, pendidikan, pengeluaran pemerintah	industri, populasi, pendidikan, pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap klasifikasi kota hijau dan non hijau.
7.	Fauzi, Akhmad dan Oxtavianus (2014)	The Measurement of Sustainable Development in Indonesia	Indeks komposit	Indeks PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks kualitas lingkungan hidup	Belum seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan lebih banyak memberikan tekanan pada lingkungan. Penggunaan IPB sebagai ukuran pembangunan berkelanjutan belum optimal.
8.	Abdullah, P.dkk (2002)	Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia,	AHP	Perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan SDA, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, governance dan kebijakan pemerintah, sumber daya manusia, manajemen dan ekonomi mikro	Peranan sumber daya alam tidak menentukan konteks perhitungan daya saing daerah, daya saing daerah bersifat dinamis. Masing-masing daerah memiliki keunggulan dan kelemahan .
9.	Hidayat, Paidi (2012)	Analisis daya saing ekonomi kota medan	AHP	infrastruktur, ekonomi, sistem keuangan, kelembagaan, sosial politik	Urutan faktor utama penentu daya saing adalah infrastruktur, ekonomi, sistem keuangan, kelembagaan, sosial politik
10.	Irawati, dkk(2012)	Pengukuran tingkat daya saing daerah di provinsi sulteng	AHP	Perekonomian daerah, variabel infrastruktur dan sumber daya alam, serta variabel sumber daya manusia	Peringkat daya saing terbaik berdasarkan variabel perekonomian daerah, infrastruktur dan SDA, SDM
11.	Huda, Miftakhul dan Eko Budi Santoso (2014)	Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur	AHP	Produktivitas sektoral, keuangan daerah, SDM, ketenagakerjaan, keterbukaan, lingkungan usaha, transportasi, energi, SDA dan lingkungan, infrastruktur dan perbankan	Ada perbedaan kemampuan daya saing antara wilayah perkotaan dan kabupaten. i hasil pemetaan, daerah yang memiliki daya saing tinggi secara umum didominasi oleh daerah yang unggul di indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah serta Lingkungan Usaha Produktif.
12.	Peneliti (2015)	Neraca daya saing daerah berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan	Indeks komposit	Kepemimpinan kota, tata kelola kota, urbanisasi dan kependudukan, perumahan dan pemukiman, resiko bencana dan perubahan iklim, kawasan tepi air, transportasi masal, ekonomi lokal dan sektor informal, pelestarian warisan budaya, pusaka alam dan kearifan lokal, ruang terbuka hijau, emisi dan energi	



## 2.2 Studi Pendahuluan dan Peta Jalan Penelitian (Roadmap Penelitian)

Secara lengkap studi pendahuluan dan roadmap penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian lanjutan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun neraca daya saing daerah berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan.
- b. Merumuskan kebijakan atas dasar hasil analisis neraca daya saing daerah berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan.

#### **3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritik dan kontribusi praktis. Kontribusi teoritik dari penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran dan pemahaman teoritik tentang daya saing berbasis indeks pembangunan kota berkelanjutan. Adapun manfaat secara praktis dari penelitian ini, bagi pengambil kebijakan khususnya pemerintah daerah, penelitian ini sebagai masukan pemahaman dan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan perkotaan (manajemen perkotaan).

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kausal (*causal effect relationship study*) dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kabupaten /kota di wilayah metropolitan Semarang

#### **4.2 Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah metropolitan Semarang yang terdiri dari 6 kabupaten/kota di wilayah metropolitan Semarang terdiri: Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota.Salatiga dan Kabupaten Grobogan.

#### **4.3 Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder bersumber dari BPS, pemerintah kabupaten/kota dengan metode dokumentasi. Data primer bersumber dari data persepsi pendapat masyarakat kota mengenai pencapaian keberlanjutan kota atau kawasan perkotaan dengan metode kuesioner kepada responden , wawancara dan dan *Focuss Group Discussion (FGD)* dengan pihak pemerintah daerah. Responden dalam konteks ini adalah masyarakat umum selaku penerima manfaat dari penyelenggaraan pembangunan. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2010-2013.

#### **4.4 Variabel , Definisi Operasioanal dan Pengukuran Variabel.**

##### **4.4.1 Variabel dan Definisi Operasional**

- a. Kepemimpinan kota : Pucuk pemerintahan memiliki visi yang jelas, dan dikomunikasikan kepada warganya.
- b. Tata kelola kota: kualitas, kuantitas dan jenis media informasi & komunikasi sebagai sarana berpartisipasi dan interaktif (masyarakat, pemerintah lokal dan dunia usaha)
- c. Urbanisasi dan kependudukan : Pemenuhan standar minimal fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lingkungan di setiap kawasan permukiman

- d. Perumahan dan pemukiman: Persentase Keluarga di Rumah Layak Huni
- e. Resiko bencana dan perubahan iklim; Panjang jalan yang dilengkapi jalur sepeda / total panjang jalan kota .
- f. Kawasan tepi air : luas kawasan tepi air yang digunakan untuk kegiatan publik / luas total kawasan tepi air
- g. Transportasi masal: jumlah kepemilikan kendaraan bermotor (penjumlahan kepemilikan motor dan mobil) perkapita atau per orang
- h. Ekonomi lokal dan sektor informal: jumlah industri kreatif dan/atau industri rumah tangga/total jumlah industri di kota
- i. Pelestarian warisan budaya , pusaka alam dan kearifan lokal: jumlah agen wisata, tour wisata, dan sejenisnya yang menawarkan paket wisata terkait dengan warisan budaya, pusaka alam, dan kearifan lokal yang ada / jumlah total agen wisata
- j. Ruang terbuka hijau, emisi dan energi: jumlah komunitas hijau / jumlah total komunitas yang ada di kota

#### 4.4.2 Pengukuran Variabel.

Semua variabel akan diukur berdasarkan nilai komposit dari 2 (dua) jenis indikator, yaitu indikator berdasarkan data objektif ( data sekunder) dan indikator berdasarkan data persepsi (data primer). Adapun pengukurannya sebagai berikut:

$$f(x) = a.X1 + b.X2 + c.X3 + d.X4 + e.X5 + f.X6 + g.X7 + h.X8 + i.X9 + j.X10$$

$$f(y) = a.Y1 + b.Y2 + c.Y3 + d.Y4 + e.Y5 + f.Y6 + g.Y7 + h.Y8 + i.Y9 + j.Y10$$

$$f(x) = \text{nilai komposit indeks berdasarkan data objektif}$$

$$f(y) = \text{nilai komposit indeks berdasarkan data persepsi}$$

a,b,...dst = bobot pada tiap butir

X1....10 = nilai total indeks pada tiap butir

Nilai komposit yang telah diperoleh dari tiap pengukuran tersebut akan dijumlahkan untuk memperoleh nilai indeks pembangunan perkotaan berkelanjutan

(SUD Index). Penjumlahan dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:  $F(SUD) = 70\% f(x) + 30\% f(y)$

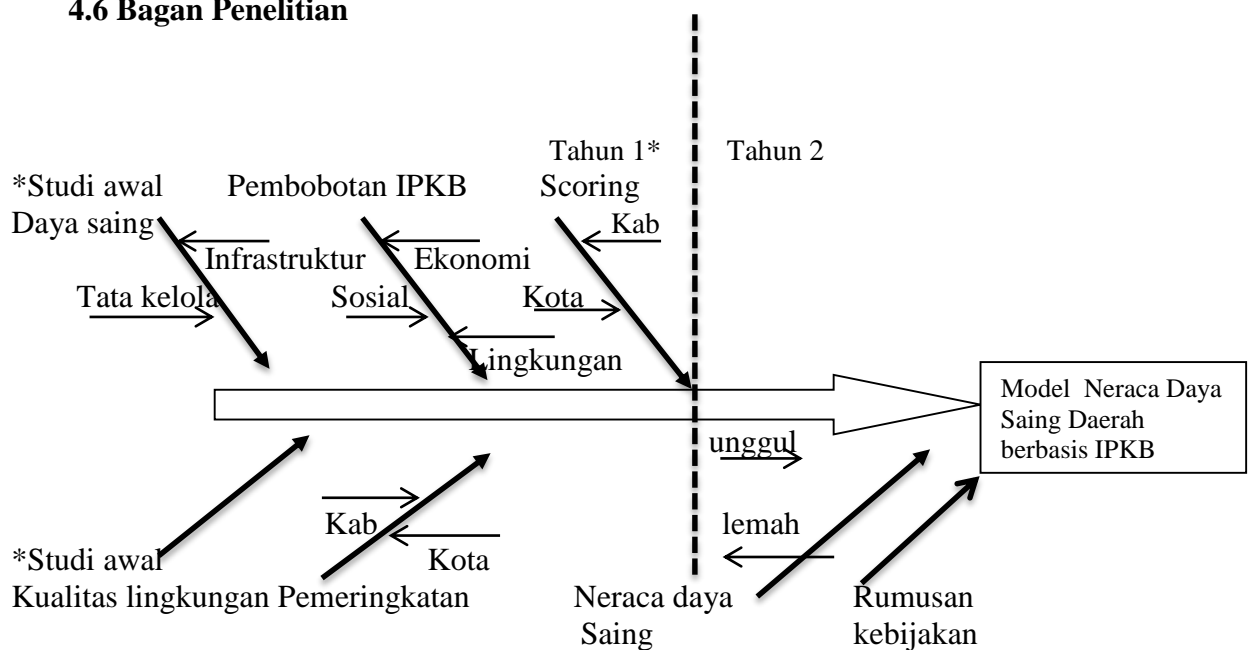
#### 4.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan masalah penelitian. Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Masalah, Metode dan Output

No.	Rumusan Masalah	Metode	Output
1.	Berapa indeks pembangunan kota berkelanjutan antar kabupaten/kota?	Indeks komposit	Indeks Pembangunan Kota Berkelanjutan (IPKB)
2.	Bagaimanakah peringkat kabupaten/kota berdasarkan IPKB	Scoring	Peringkat
3.	Bagaimana neraca daya saing daerah berbasis Indeks Pembangunan Kota Berkelanjutan	Deskriptif	Neraca daya saing
4.	Bagaimana rumusan kebijakan atas dasar hasil analisis neraca daya saing daerah berbasis Indeks Pembangunan Kota Berkelanjutan	Wawancara, FGD	Model kebijakan

#### 4.6 Bagan Penelitian



Gambar 4.2 Bagan Penelitian

\*Sudah dilakukan

## BAB V

### HASIL YANG DICAPAI

#### 5.1 Konsep dan Pengertian Neraca Daya Saing Kabupaten/Kota

Pemeringkatan kabupaten/kota berdasarkan indeks pembangunan berkelanjutan berguna untuk melakukan perbandingan keadaan masing-masing kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota lainnya di wilayah Metropolitan Semarang. Pemeringkatan ini dipakai sebagai konsep daya saing antar kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang. Seperti dalam hasil penelitian sebelumnya (Tabel 5.1), Kota Semarang memiliki peringkat tertinggi berdasarkan indeks pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Grobogan menempati peringkat kedua disusul Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dan peringkat terakhir Kabupaten Demak.

Tabel 5.1 Peringkat Kabupaten/kota Berdasarkan Indeks Pembangunan Kota Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Semarang

Kab/Kota	Indeks	Kriteria	Peringkat
K. Semarang	127,83	Kurang berkelanjutan	1
Grobogan	120,65	Kurang berkelanjutan	2
K. Salatiga	120,28	Kurang Berkelanjutan	3
Kendal	117,41	Kurang Berkelanjutan	4
Semarang	106,66	Kurang Berkelanjutan	5
Demak	103,00	Kurang berkelanjutan	6
Rata-rata	115,97		

Sumber: Data Sekunder dan Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan indeks pembangunan kota berkelanjutan, seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Metropolitan masuk kriteria kurang berkelanjutan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh *Sustainable Urban Development* –Forum (SUD, 2013). Penentuan kriteria kabupaten/kota masuk sebagai kota berkelanjutan atau tidak ditentukan seperti yang dijelaskan dari Tabel 5.1 merupakan

pemeringkatan total skor berdasarkan indeks pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari komponen data primer (subyektif) dan data sekunder (obyektif). Pemeringkatan ini dapat dirinci berdasarkan variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 10 (sepuluh) variabel yang terdiri dari variabel utama yaitu Kepemimpinan Kota (X1), Tata Kelola Kota (X2), Urbanisasi dan Kependudukan (X3), Perumahan dan Pemukiman (X4). Variabel penunjang 1 terdiri dari Resiko Bencana dan Perubahan Iklim (X5), Kawasan Tepi Air (X6), Transportasi Masal (X7). Variabel penunjang 2 terdiri dari Ekonomi Lokal dan Sektor Informal (X8), Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal (X9), Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi (X10).

Meskipun semua kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang tidak masuk kriteria berkelanjutan, hal yang harus dilakukan adalah bagaimana kabupaten/kota ke depannya dapat mewujudkan kota yang berkelanjutan. Untuk menuju kota yang berkelanjutan banyak hal yang harus disiapkan oleh pemerintah kota. Persiapan ini seharusnya melalui perencanaan program-program termasuk faktor-faktor yang menentukan daya saing. Faktor-faktor ini berguna untuk perencanaan pembangunan. Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor yang menjadi dasar keunggulan dan kelemahan suatu kabupaten/kota sehingga dapat menempati posisi peringkat yang sudah dijelaskan pada hasil penelitian sebelumnya. Harapannya dengan diketahui keunggulan dan kelemahan lebih mudah mengarahkan prioritas perbaikan dan penekanan sasaran dalam pembangunan. Ilmu ekonomi muncul karena ada keterbatasan (*scarcity*) sumber daya yang dimiliki dalam memenuhi kebutuhan. Untuk itu harus melakukan pilihan dengan asumsi pilihan yang dilakukan adalah pilihan yang terbaik. Berkaitan dengan pilihan, memilih skala prioritas menjadi hal yang penting. Demikian juga kabupaten/kota dalam memilih prioritas dan sasaran pembangunan dengan keterbatasan anggaran dan waktu yang ada.

Penentuan prioritas dan sasaran dalam pembangunan yang akan dilakukan dapat dengan mudah dilakukan jika ada suatu neraca yang mengidentifikasi sumber kekuatan dan kelemahan kabupaten/kota sehingga mencapai peringkat tertentu dalam daya saing. Menurut (Abdullah, et al., 2002) konsep kekuatan

(*advantages*) dan kelemahan (*disadvantage*) sebagai pembentuk neraca daya saing suatu daerah. Faktor *advantage* menunjukkan variabel atau indikator yang merupakan kekuatan atau keunggulan suatu daerah dan *disadvantage* menunjukkan variabel atau indikator yang menunjukkan kelemahan suatu daerah.

Konsep neraca daya saing mengacu pada kekuatan kelemahan suatu kabupaten/kota dalam mencapai daya saing. Acuan yang digunakan dari hasil inventarisasi faktor-faktor atau variabel yang secara relatif menjadi kekuatan atau kelemahan suatu kabupaten/kota dalam mencapai daya saing. Pengertian relatif diartikan sebagai *advantage* dan *disadvantage* dari suatu kabupaten/kota terhadap variabel-variabel lainnya dan perbandingan terhadap kabupaten/kota lainnya. Ukuran relatif adalah nilai rata-rata peringkat kabupaten/kota dibandingkan dengan seluruh wilayah metropolitan Semarang.

Metode yang digunakan untuk mengukur faktor keunggulan dan kelemahan memberikan implikasi bagi kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang. Posisi peringkat tidak secara langsung berkorelasi dengan faktor keunggulan dan kelemahan karena menggunakan angka relatif perbandingan antara satu kabupaten/kota dengan rata-rata nilai indeks seluruh wilayah Metropolitan Semarang menurut variabel dan jenis data yang digunakan. Kemungkinan dapat terjadi kabupaten/kota yang memiliki peringkat tinggi memiliki faktor kelemahan lebih banyak dan juga sebaliknya.

Implikasi lain apabila kabupaten/kota memiliki jumlah faktor keunggulan dan kelemahan yang sama tidak akan peringkatnya sama karena semua variabel ikut diperhitungkan dalam penentuan peringkat. Untuk itu dalam bahasan daya saing akan dianalisis berdasarkan jenis data, variabel dan juga indikator-indikator yang digunakan sehingga kabupaten/kota dapat memanfaatkan untuk perencanaan program-program pembangunan khususnya berkaitan dengan pembangunan kota berkelanjutan.

## **5.2 Pemingkatan Daya Saing Kabupaten/Kota Berdasarkan variabel**

Variabel yang digunakan untuk pemingkatan ada 10 variabel yang sudah dijelaskan pada sub bab 5.1.1 dan masing-masing memiliki indikator-indikator.



Adapun variabel utama, penunjang dan indikator dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan Tabel 5.3

Tabel 5.2 Variabel Utama dan indikator

No	Variabel Utama	Indikator	
		Subyektif (Persepsi)	Obyektif
1	Kepemimpinan (X1)	a. Kualitas b. Kedekatan c. Koordinasi d. Perubahan Ekonomi e. Perubahan Sosial Budaya f. Perubahan Fisik Lingkungan	a. Visi
2.	Tata Kelola (X2)	a. Perijinan b. Partisipasi Usulan c. Partisipasi Rancangan d. Partisipasi Pengadaan e. Partisipasi Pengawasan f. Keberadaan lembaga keswadaayaan masyarakat	a. Media Informasi dan komunikasi b. Keberagaman institusi partisipana.
3.	Urbanisasi dan Kependudukan (X3)	a. Kemudahan akses data kependudukan b. Keberadaan dan peran kelembagaan c. Upaya peningkatan kualitas SDM d. Upaya pengendalian mobilitas penduduk e. Upaya pengendalian urbanisasi f. Pemukiman vertikal	a. Keberadaan pengendalian mobilitas penduduk b. Pemenuhan tupoksi c. Penyediaan ruang daur hidup
4.	Perumahan dan Pemukiman (X4)	a. Rumah tidak layak huni b. Rumah kumuh c. Air bersih dan layak minum d. Sanitasi lingkungan e. Sampah f. Sarana lingkungan	a. MBR yang tempat tinggalnya layak b. MBR yang menerima kredit perumahan.

Sumber: SUD, 2013

Tabel 5.3 Variabel Penunjang dan Indikator

No	Variabel Penunjang 1	Indikator	
		Subyektif ( Persepsi)	Obyektif
1	Resiko Bencana dan Perubahan Iklim (X5)	a.Tanggap darurat	a. Pengurangan emisi b. Jalur sepeda c. Budaya green
2.	Kawasan Tepi Air (X6)	a. Adanya ruang publik b. Bebas perumahan kumuh	a. Pemanfaatan kegiatan publik
3.	Transportasi Masal (X7)	a. Fasilitas jalur sepeda b. Angkutan umum	a. Kendaraan tidak bermotor
No	Variabel Penunjang 2	Indikator	
		Subyektif ( Persepsi)	Obyektif
1	Ekonomi Lokal dan Sektor Informal (X8)	a.Pengembangan ekonomi lokal	a. Keberadaan industri kecil b. Keberadaan ruang publik sektor informal
2.	Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal (X9)	a. Apresiasi terhadap warisan budaya b. Perlindungan terhadap warisan budaya	a. Eksistensi dan peran komunitas b. Peningkatan ekonomi lokal
3.	Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi (X10)	a.Penggunaan tanaman hortikultura b.RTH yang terpelihara	a. Keberadaan komunitas hijau b. Eksistensi kebijakan

Sumber : SUD, 2013

Berdasarkan variabel utama dan penunjang yang digunakan, pemeringkatan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 4. Kota Semarang menduduki peringkat teratas dan Kabupaten Demak menduduki peringkat terendah di wilayah metropolitan Semarang. Kota Semarang memiliki keunggulan rata-rata di semua variabel baik variabel utama maupun penunjang, hanya satu variabel transportasi masal yang memiliki peringkat rendah. Hal ini dapat dijelaskan karena Kota Semarang sebagai Ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk yang sangat padat yang membutuhkan juga alat transportasi yang semakin meningkat

pula. Kebutuhan transportasi ini belum didukung dengan sistem transportasi yang berkelanjutan. Kabupaten Grobogan menduduki peringkat dua, yang menarik Kabupaten Grobogan kepemimpinan, tata kelola dan ruang terbuka hijau memiliki peringkat teratas namun variabel lainnya memiliki peringkat yang terbawah terutama resiko bencana dan perubahan iklim. Kota Salatiga bertolak belakang dengan Kabupaten Grobogan, memiliki peringkat teratas dalam variabel resiko bencana dan perubahan iklim. Hal ini sesuai dengan kondisi geografi Kota Salatiga yang ada di dataran tinggi dan lebih sejuk didukung jumlah penduduk Kota Salatiga yang relatif tidak padat dibandingkan kabupaten/kota di wilayah metropolitan Semarang sehingga jumlah emisi yang dihasilkan dari alat transportasi relatif sedikit. Ekonomi Lokal dan Sektor Informal di Kota Salatiga juga peringkat teratas mengingat banyaknya industri kecil yang sudah dikembangkan. Kabupaten Kendal memiliki peringkat yang rendah dalam variabel kepemimpinan dan Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal. Meskipun pelestarian warisan budaya, pusaka alam dan kearifan lokal yang memiliki peringkat rendah namun peringkat Ekonomi Lokal dan Sektor Informal dan Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi tinggi hal ini menunjukkan Kabupaten Kendal sebagai kota industri tetap memperhatikan variabel ruang terbuka hijau. Kabupaten Semarang menduduki peringkat kelima, hampir rata-rata semua variabel baik utama maupun penunjang peringkatnya rendah. Peringkat terendah kabupaten/kota di wilayah metropolitan Semarang dalam hal indeks pembangunan kota berkelanjutan adalah Kabupaten Demak, meskipun variabel Kawasan Tepi Air dan Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal memiliki peringkat tertinggi. Kabupaten Demak terkenal sebagai kota wali yang memiliki apresiasi tinggi terhadap pelestarian warisan budaya. Kabupaten Demak memiliki obyek wisata pantai yang banyak dikunjungi seperti taman mangrove Morosari, Wisata Bahari Morosari, Pantai Onggojoyo yang bisa meningkatkan ekonomi lokal. Kawasan tepi pantai dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka untuk publik. Pemanfaatan ruang terbuka untuk publik ini didukung baik dengan data obyektif maupun dari persepsi masyarakat.

Tabel 5.4 Pemeringkatan Kabupaten/kota Berdasarkan Variabel yang Digunakan

Kabupaten/Kota	Peringkat	Peringkat Menurut Variabel									
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10
K. Semarang	1	2	2	1	1	2	2	6	3	3	1
Grobogan	2	1	1	5	5	6	5	1	5	5	5
K. Salatiga	3	3	5	2	2	1	4	2	1	2	3
Kendal	4	5	3	3	3	3	3	4	2	6	2
Semarang	5	4	6	4	6	5	6	5	4	4	6
Demak	6	6	4	6	4	4	1	3	6	1	4

Sumber: Data Sekunder dan Primer yang diolah, 2017

### **5.3 Pemeringkatan Daya Saing Kabupaten/Kota Berdasarkan Kelompok Indikator dan jenis data**

#### **5.3.1. Kepemimpinan Kota**

##### **a. Kualitas Kepemimpinan**

Berdasarkan indikator kualitas kepemimpinan, Kabupaten Grobogan menempati posisi tertinggi di peringkat pertama di wilayah metropolitan Semarang. Menurut persepsi masyarakat, pucuk pemerintahan kota merupakan sosok pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik. Kualitas kepemimpinan yang baik adalah jujur, adil dan bijaksana, dekat dengan masyarakat, berprestasi dan punya kinerja yang baik. Kabupaten Grobogan dilihat dari skor yang diperoleh tertinggi dalam hal kualitas kepemimpinan kualitas pimpinan dinilai adil dan bijaksana, dekat dengan masyarakat, berprestasi dan punya kinerja yang baik. Kabupaten Demak menempati posisi peringkat terendah dalam skor kualitas kepemimpinan. Pimpinan di Kabupaten Demak dinilai dekat dengan masyarakat, berprestasi dan punya kinerja yang baik. Skor rata-rata seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah metropolitan Semarang memiliki kualitas pimpinan yang adil, dekat dengan masyarakat, berprestasi dan punya kinerja yang baik

##### **b. Kedekatan Pimpinan dengan Warga**

Kedekatan pimpinan dengan warga kota dapat dilihat dari bentuk kegiatan yang dilakukan pimpinan kota seperti dialog langsung, tanggapan atas surat/proposal tertulis, tanggapan balik atas komentar yang ditujukan kepada

pimpinan di akun media sosial, dapat mengakses berita tentang kegiatan dan kondisi kedinasan pimpinan di media sosial, mengetahui kegiatan dan kondisi kedinasan pimpinan di media mainstream. Berdasarkan persepsi masyarakat, Kabupaten Grobogan menempati peringkat tertinggi dalam hal kedekatan pimpinan dengan warga. Pimpinan di Kabupaten Grobogan dinilai memiliki tanggapan balik atas komentar yang ditujukan kepada pimpinan di akun media sosial, dapat mengakses berita tentang kegiatan dan kondisi kedinasan pimpinan di media sosial, mengetahui kegiatan dan kondisi kedinasan pimpinan di media mainstream. Kabupaten yang menempati peringkat terendah menurut persepsi masyarakat dalam hal kedekatan pimpinan dengan warga adalah kota Salatiga. Warga masyarakat hanya dapat mengakses berita tentang kegiatan dan kondisi kedinasan pimpinan di media sosial, mengetahui kegiatan dan kondisi kedinasan pimpinan di media mainstream. Skor rata-rata seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah metropolitan Semarang dalam hal kedekatan pimpinan dengan warganya cukup dekat. Kedekatan ini karena pimpinan memberi tanggapan balik atas komentar yang ditujukan kepada pimpinan di akun media sosial, dapat mengakses berita tentang kegiatan dan kondisi kedinasan pimpinan di media sosial, mengetahui kegiatan dan kondisi kedinasan pimpinan di media mainstream.

### **c. Koordinasi antar Dinas**

Koordinasi antara dinas-dinas merupakan salah satu indikator kepemimpinan. Sejauh mana terjalinnya hubungan kerjasama antar dinas dalam suatu program pembangunan menjadi penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan kota. Kabupaten Grobogan berdasarkan persepsi masyarakat menempati posisi peringkat tertinggi. Masyarakat Kabupaten Grobogan berpendapat bahwa dinas-dinas mendapatkan wawasan yang luas dalam menjalankan fungsi regulator dan fasilitator publik pada program, dinas-dinas selalu hadir pertemuan pembahasan program; dinas-dinas mempunyai visi dan misi yang sama dalam menjalankan program yang sudah disepakati bersama. Kabupaten yang menempati peringkat terendah dalam hal koordinasi di wilayah metropolitan Semarang adalah Kabupaten Semarang. Dalam hal koordinasi antar dinas, pimpinan Kabupaten Semarang berpendapat dinas-dinas selalu hadir pertemuan

pembahasan program; dinas-dinas mempunyai visi dan misi yang sama dalam menjalankan program yang sudah disepakati bersama. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah metropolitan Semarang dalam hal koordinasi dinas-dinas belum mendapatkan wawasan yang luas dalam menjalankan fungsi regulator dan fasilitator publik pada program apalagi mengalami peningkatan kapasitas dalam proses 'belajar' bersama. Berdasarkan persepsi masyarakat dinas-dinas selalu hadir pertemuan pembahasan program, dinas-dinas mempunyai visi dan misi yang sama dalam menjalankan program yang sudah disepakati bersama.

#### **d. Perubahan dalam Bidang Ekonomi**

Penilaian kepemimpinan kota dapat dilihat dari sejauhmana perubahan yang lebih baik di bidang ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat. Berdasarkan persepsi masyarakat, Kabupaten Grobogan menempati peringkat pertama dalam hal perubahan ekonomi. Perubahan yang dirasakan masyarakat dalam bidang ekonomi distribusi produk lebih lancar, produksi lebih lancar karena sistem tenaga kerja lebih baik, bahan baku mudah diperoleh, tidak ada lagi pungutan liar. Kabupaten yang memperoleh peringkat terbawah dalam hal perubahan ekonomi adalah Kabupaten Semarang. Perubahan ekonomi di Kabupaten Semarang berdasarkan persepsi masyarakat adalah produksi lebih lancar karena sistem tenaga kerja lebih baik; bahan baku mudah diperoleh; tidak ada lagi pungutan liar. Hal ini masih jauh di bawah Kabupaten Grobogan yang sudah dapat mencapai produksi yang lancar bukan hanya karena sistem tenaga kerja yang lebih baik. Rata-rata perubahan ekonomi yang dirasakan masyarakat di kabupaten/kota di wilayah metropolitan Semarang belum dapat mencapai kesejahteraan keluarga yang meningkat, masih sebatas distribusi produk lebih lancar.

#### **e. Perubahan dalam Bidang Sosial Budaya**

Indikator lain yang digunakan dalam menilai kepemimpinan kota adalah sejauhmana perubahan dalam bidang sosial budaya yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan persepsi masyarakat perubahan dalam bidang sosial budaya di kabupaten/kota di wilayah metropolitan Semarang yang menempati peringkat tertinggi adalah Kabupaten Grobogan. Perubahan dalam bidang sosial budaya di Kabupaten Grobogan lebih rukun dan harmoninya interaksi antar

kelompok remaja dan antar sekolah, lebih rukun dan harmoninya interaksi antar komunitas kampung, lebih rukun dan harmoninya kehidupan antar agama dan antar suku, bertambahnya kuantitas obyek wisata budaya. Meskipun menempati peringkat yang tertinggi, Kabupaten Grobogan dalam hal perubahan bidang sosial budaya belum dapat mencapai bertambahnya kualitas obyek wisata budaya. Rata-rata semua kabupaten/kota yang ada di wilayah metropolitan Semarang dalam hal perubahan bidang sosial budaya belum mencapai perubahan kualitas obyek wisata budaya. Kabupaten yang peringkat terendah dalam perubahan sosial budaya adalah Kabupaten Demak. Hal ini sangat disayangkan mengingat Kabupaten Demak terkenal dengan kota wali dan terdapat Masjid Agung Demak yang dalam sejarah Islam tercatat sebagai kota masuknya agama Islam di Pulau Jawa lewat budaya Jawa. Kabupaten Demak berdasarkan persepsi masyarakat dalam hal perubahan sosial budaya lebih rukun dan harmoninya interaksi antar kelompok remaja dan antar sekolah, lebih rukun dan harmoninya interaksi antar komunitas kampung, lebih rukun dan harmoninya kehidupan antar agama dan antar suku namun belum ada bertambahnya kuantitas dan kualitas obyek wisata budaya.

#### **f. Perubahan dalam Bidang fisik Lingkungan (ekologi)**

Kepemimpinan kota tidak hanya dilihat dari perubahan bidang ekonomi, sosial budaya namun yang tidak kalah penting dalam kaitannya dengan pembangunan kota berkelanjutan adalah perubahan dalam bidang fisik lingkungan (ekologi). Perubahan fisik lingkungan yang diharapkan lingkungan lebih bersih dari sampah bertebaran, drainase lebih lancar, tidak ada selokan maupun sungai yang mampet, lalu lintas lancar, kualitas udara lebih baik, karena makin banyak pohon dan berkurangnya polusi asap kendaraan. Harapan ini tidak semuanya dapat terwujud di kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang dalam hal perubahan lingkungan fisik lingkungan (ekologi) hanya mencapai lingkungan lebih bersih dari sampah bertebaran, drainase lebih lancar dan tidak ada selokan maupun sungai yang mampet. Kabupaten Grobogan tetap menempati urutan pertama dalam hal perubahan bidang fisik lingkungan (ekologi) berdasarkan persepsi masyarakat. Perubahan bidang fisik lingkungan (ekologi) yang dapat dirasakan oleh masyarakat

di Kabupaten Grobogan adalah lingkungan lebih bersih dari sampah bertebaran, drainase lebih lancar, tidak ada selokan maupun sungai yang mampet dan lalu lintas lancar. Lalu lintas yang lancar ini menjadi capaian di atas rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang. Kabupaten Grobogan, Kota Semarang dan Kota Salatiga merupakan kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang yang dapat mencapai perubahan fisik lingkungan (ekologi) di atas rata-rata. Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak adalah kabupaten/kota yang pencapaian perubahan fisik lingkungan (ekologi) di bawah rata-rata. Bahkan Kabupaten Demak menempati peringkat terendah dalam hal perubahan fisik lingkungan (ekologi). Capaian perubahan fisik lingkungan (ekologi) di Kabupaten Demak lingkungan lebih bersih dari sampah bertebaran, drainase lebih lancar, tidak ada selokan maupun sungai yang mampet. Tantangan dalam hal perubahan fisik lingkungan (ekologi) di semua kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang adalah lalu lintas yang masih macet dan kualitas udara yang belum lebih baik, karena makin belum banyak pohon yang sebanding dengan polusi asap kendaraan. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Kepemimpinan Kota dapat dilihat pada Tabel 5.5

Tabel 5.5 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan Indikator Kepemimpinan Kota dan Persepsi Masyarakat

Kab/Kota	Kepemimpinan	Indikator					
		Kualitas	Kedekatan	Koordinasi	Perubahan Ekonomi	Perubahan Sosial Budaya	Perubahan ekologi
Grobogan	1	1	1	1	1	1	1
K Semarang	2	2	2	2	2	2	2
Salatiga	3	3	6	5	3	3	3
Semarang	4	5	3	6	6	4	4
Kendal	5	4	4	3	5	5	5
Demak	6	6	5	4	4	6	6

Sumber: Data Primer Persepsi Masyarakat, 2016

#### g. Visioner dan Kreatif

Indikator kepemimpinan kota yang dapat digunakan sebagai penilaian kepemimpinan kota yang baik selain dari kualitas kepemimpinan, kedekatan



pimpinan dengan warganya, koordinasi antar dinas, perubahan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik lingkungan (ekologi) adalah pimpinan yang memiliki visi dan kreatif. Pucuk pemerintahan memiliki visi yang jelas, dan dikomunikasikan kepada warganya, kreatif dalam program pembangunannya, dan inklusif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan program pembangunannya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Ketersediaan dokumen tersebut menjadi penilaian apakah pucuk pimpinan kota baik. Kabupaten Grobogan tetap menempati peringkat pertama dalam hal ketersediaan data tertuangnya visi dan kreatif pimpinan kota dalam RPJP. Kabupaten Grobogan kepemimpinan memiliki visi yang jelas, dan dikomunikasikan kepada warganya, kreatif dalam program pembangunannya, dan inklusif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan program pembangunannya Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang pucuk pimpinan berdasarkan data obyektif, kepemimpinan dengan visi yang jelas dan publik menerimanya, perencanaan dan pelaksanaan program dengan cara-cara yang kreatif dan inklusif namun belum ada pengawasan program pembangunan sebagai monitoring dan evaluasi program. Kabupaten yang di atas rata-rata memiliki kepemimpinan yang visioner dan kreatif adalah Kabupaten Grobogan, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang sedangkan yang dibawah rata-rata adalah Kota Salatiga, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak. Bahkan Kabupaten Demak menempati posisi peringkat terendah yaitu belum optimalnya pengawasan program-program pembangunan. Secara lengkap peringkat Kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan kepemimpinan kota dan data obyektif dapat dilihat pada Tabel. 5.6

Tabel 5.6 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan Indikator Kepemimpinan Kota dan Data Obyektif

Kab/Kota	Kepemimpinan	Indikator
		Visioner dan Kreatif
Grobogan	1	1
K Semarang	2	2
Salatiga	3	4
Semarang	4	3
Kendal	5	5
Demak	6	6

Sumber: Setda,2016

### 5.3.2 Tata Kelola Kota

#### a. Kemudahan Pengurusan Kartu Identitas dan Perijinan

Salah satu indikator dalam variabel tata kelola adalah kemudahan pengurusan kartu identitas dan perijinan. Kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya dan surat ijin seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Kemudahan yang dimaksud adalah mengurus kartu identitas dan perizinan, mudah, cepat dan tanpa pungutan biaya apapun. Kota Semarang dalam hal kemudahan pengurusan kartu identitas dan kartu ijin menempati peringkat tertinggi yaitu mengurus kartu identitas dan perizinan, mudah, cepat, hanya masih ada yang dikenai biaya administrasi yang sangat kecil sekedar mengisi uang kas. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah metropolitan Semarang dalam hal kemudahan mengurus kartu identitas dan perijinan masih ada pungutan biaya administrasi meskipun sangat kecil. Kabupaten/kota yang kemudahan dalam mengurus kartu identitas dan perijinan di atas rata-rata adalah Kabupaten Grobogan, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Kabupaten yang berada di bawah rata-rata dalam hal pengurusan kartu identitas dan perijinan adalah Kabupaten Kendal, Kota Salatiga dan Kabupaten Demak, bahkan Kabupaten Demak berada pada posisi peringkat terendah. Terendahnya Kabupaten Demak dalam hal kemudahan pengurusan kartu identitas dan perijinan karena masih membutuhkan waktu sekitar seminggu.

## **b. Kemudahan Partisipasi dalam Pengusulan Peraturan atau Kebijakan**

Partisipasi dalam pengusulan peraturan atau kebijakan berdasarkan persepsi masyarakat dinilai baik apabila ikut berbicara, memberi masukan (gagasan, saran, kritik) dalam suatu pertemuan para pemangku kepentingan yang dihadiri walikota/bupati dan dewan legislatif. Kabupaten Grobogan menempati peringkat tertinggi dalam hal kemudahan partisipasi dalam pengusulan peraturan atau kebijakan namun hanya ikut berbicara, memberi masukan (gagasan, saran, kritik) dalam suatu pertemuan para pemangku kepentingan yang dihadiri kepala Bappeda. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah metropolitan Semarang dalam hal partisipasi pengusulan peraturan atau kebijakan hanya sebatas memberi suara pada suatu petisi atas nama masyarakat sipil di media sosial. Kabupaten/kota yang dalam hal partisipasi pengusulan peraturan atau kebijakan sudah di atas rata-rata yang dilakukan adalah kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang selain Kabupaten Grobogan adalah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, kabupaten lainnya berada di bawah rata-rata yaitu Kabupaten Demak, Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Bahkan Kabupaten Demak dan Salatiga warganya lebih banyak sekedar mengikuti pemberitaan pimpinannya di media mainstream.

## **c. Kemudahan Partisipasi dalam Perancangan/Penyusunan Peraturan atau Kebijakan**

Salah satu indikator tata kelola kota yang berkelanjutan adalah adanya kemudahan partisipasi dalam perancangan/penyusunan peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh warga. Penilaian indikator ini yang baik adalah ikut berbicara, memberi masukan (gagasan, saran, kritik) dalam suatu pertemuan para pemangku kepentingan yang dihadiri Walikota/Bupati dan dewan kota/badan legislatif daerah. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang dalam hal kemudahan partisipasi dalam perancangan/penyusunan peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh warga masih sebatas membuat tulisan dan mengirimkan kepada Walikota/Bupati. Hal ini menunjukkan masih sangat minimnya partisipasi warga. Kabupaten yang menempati peringkat tertinggi dalam hal kemudahan partisipasi dalam perancangan/penyusunan peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh warga adalah Kabupaten Grobogan dan posisi peringkat terendah adalah Kota

Salatiga. Kabupaten Grobogan dalam tata kelola kota khususnya dilihat dari indikator kemudahan partisipasi dalam perancangan/penyusunan peraturan atau kebijakan yang dilakukan, warga sudah ikut berbicara, memberi masukan (gagasan, saran, kritik) dalam suatu pertemuan para pemangku kepentingan yang dihadiri kepala Bappeda tidak sampai pertemuan yang dihadiri oleh walikota dan dewan legislatif.

**d. Kemudahan Partisipasi dalam Pengusulan Pengadaan/Pemeliharaan/Penghancuran Fasilitas Publik**

Bentuk partisipasi warga dalam tata kelola kota ikut menentukan penilaian baik tidaknya tata kelola kabupaten/kota. Kemudahan partisipasi dalam pengusulan pengadaan/pemeliharaan/penghancuran fasilitas publik menjadi salah satu indikator tata kelola kota. Berdasarkan indikator kemudahan partisipasi dalam pengusulan pengadaan/pemeliharaan/penghancuran fasilitas publik, Kabupaten Grobogan masih menempati urutan pertama disusul oleh Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan terakhir Kota Salatiga. Rata-rata kabupaten/kota memperoleh penilaian dari masyarakat dalam hal partisipasi dalam pengusulan pengadaan/pemeliharaan/penghancuran fasilitas publik adalah masih sebatas memberi suara pada suatu petisi atas nama masyarakat sipil di media sosial. Partisipasi yang paling baik adalah ikut berbicara, memberi masukan (gagasan, saran, kritik) dalam suatu pertemuan para pemangku kepentingan yang dihadiri Walikota/Bupati dan dewan kota/badan legislatif daerah. Kabupaten Grobogan sebagai kabupaten yang menempati urutan pertama dalam hal partisipasi dalam pengusulan pengadaan/pemeliharaan/penghancuran fasilitas publik, sudah ikut berbicara, memberi masukan (gagasan, saran, kritik) dalam suatu pertemuan para pemangku kepentingan yang dihadiri kepala Bappeko/Bappeda yang berarti sudah di atas rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang yang hanya sebatas memberi suara pada suatu petisi atas nama masyarakat sipil di media sosial. Kabupaten/kota yang partisipasi di atas rata-rata hanya Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang, selain itu partisipasinya dalam hal kemudahan pengusulan pengadaan/pemeliharaan/penghancuran fasilitas rendah atau di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan sebagian besar kabupaten/kota di

wilayah Metropolitan Semarang yaitu Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang perlu ada peningkatan dan kerja keras untuk meningkatkan kemudahan partisipasi warganya.

**e. Kemudahan Partisipasi dalam Perencanaan/Pelaksanaan/Pengawasan Pembangunan Prasarana, Sarana Fasilitas Publik**

Indikator tata kelola kota dapat dilihat sejauhmana kemudahan partisipasi warga dalam perencanaan/pelaksanaan/pengawasan pembangunan prasarana, sarana fasilitas publik. Kemudahan partisipasi yang diharapkan adalah ikut berbicara, memberi masukan (gagasan, saran, kritik) dalam suatu pertemuan para pemangku kepentingan yang dihadiri Walikota/Bupati dan dewan kota/badan legislatif daerah. Kemudahan partisipasi warga rata-rata di kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang hanya sebatas memberi suara pada suatu petisi atas nama masyarakat sipil di media sosial. Kabupaten Grobogan tetap menempati peringkat pertama dalam hal kemudahan partisipasi perencanaan/pelaksanaan/pengawasan pembangunan prasarana, sarana fasilitas publik. Kota Salatiga menempati peringkat terendah bahkan persepsi masyarakat dalam hal partisipasi lebih banyak hanya mengikuti pemberitaan di media mainstream. Kabupaten Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang dalam hal partisipasi pengawasan jauh lebih baik dan di atas rata-rata, sedangkan Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Salatiga dalam hal partisipasi di bawah rata-rata.

**f. Keberadaan LKM/BKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat / Badan Keswadayaan Masyarakat)**

Keberadaan lembaga keswadayaan masyarakat atau badan keswadayaan masyarakat sebagai indikator tata kelola kota dilihat sejauh mana lembaga masyarakat tersebut memberi kegunaan dan manfaat bagi lingkungan pemukiman dan masyarakat. Berdasarkan persepsi masyarakat, rata-rata kabupaten/kota di wilayah metropolitan Semarang adanya LKM/BKM sebagai media warga, warga jadi lebih mudah mengakses informasi publik, lebih mudah menyampaikan aspirasi, berbagi informasi ke sesama warga, maupun ke para pemangku kepentingan lainnya. Harapan yang paling tinggi terhadap keberadaan lembaga swadaya dalam hal kemanfaatannya adalah dengan adanya LKM/BKM,

warga jadi lebih partisipatif dan peduli dalam upaya perencanaan, pengembangan dan pengendalian tata ruang di permukiman kami. Kabupaten Grobogan, berdasarkan persepsi masyarakat menempati posisi peringkat tertinggi di wilayah metropolitan Semarang. Perolehan Kabupaten Grobogan dalam hal keberadaan adanya LKM/BKM, warga jadi lebih mudah mengakses informasi publik, lebih mudah menyampaikan aspirasi, berbagi informasi ke sesama warga, maupun ke para pemangku kepentingan lainnya, dan lebih percaya diri dalam membuat keputusan secara konsensus untuk kepentingan bersama. Manfaat keberadaan lembaga swadaya di Kabupaten Grobogan di atas rata-rata yang diperoleh kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan persepsi masyarakat. Kabupaten yang keberadaan lembaga swadaya memberi manfaat di atas rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang selain Kabupaten Grobogan adalah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Kabupaten yang menempati posisi terendah dalam menerima manfaat keberadaan lembaga swadaya adalah Kabupaten Semarang dengan adanya LKM/BKM yang menjalankan media warga, warga jadi lebih mudah mengakses informasi publik, lebih mudah menyampaikan aspirasi, berbagi informasi ke sesama warga, maupun ke para pemangku kepentingan lainnya. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Tata Kelola Kota dan persepsi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.7

Tabel 5.7 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan Indikator Tata Kelola Kota dan Persepsi Masyarakat

Kab/Kota	Indikator						
	Tata kelola	Perijinan	Partisipasi Usulan	Partispasi Rancangan	Partisipasi Pengadaan	Partisipasi Pengawasan	Keberadaan LSM/BKM
Grobogan	1	3	1	1	1	1	1
K Semarang	2	1	2	2	2	2	2
Kendal	3	5	3	3	4	4	3
Demak	4	6	6	5	5	5	6
Salatiga	5	4	5	6	6	6	4
Semarang	6	2	4	4	3	3	5

Sumber: Data Primer Persepsi Masyarakat, 2016

### **g. Media Informasi dan komunikasi**

Berdasarkan data obyektif, indikator tata kelola kota dapat diukur dengan Semakin tinggi kualitas, kuantitas dan jenis media informasi & komunikasi sebagai sarana berpartisipasi dan interaktif (masyarakat, pemerintah lokal dan dunia usaha), nilainya makin tinggi. Nilai yang paling tinggi diperoleh jika ada dan berfungsinya media cetak periodik (bulanan), kotak pengaduan, usulan dan saran di tiap kantor kelurahan, no. telp untuk sms pengaduan, usulan dan saran, akun email untuk email pengaduan, usulan dan saran, media on-line (website dan/atau akun media sosial), yakni senantiasa terkini, interaktif (bisa diakses dan direspons) oleh setiap warga, di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan, bagi kelembagaan, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang dalam hal berfungsinya media informasi & komunikasi, ada dan berfungsinya : media cetak periodik (3 bulanan) dari pemerintah lokal di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan, kotak pengaduan, usulan dan saran di tiap kantor kelurahan, no. telp untuk sms pengaduan, usulan dan saran; akun email untuk email pengaduan, usulan dan saran. Hal ini berarti rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang belum tersedianya media on-line (website dan/atau akun media sosial), yakni senantiasa terkini, interaktif (bisa diakses dan direspons) oleh setiap warga, di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan, bagi kelembagaan, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Kota Salatiga menempati peringkat tertinggi dalam hal berfungsinya media informasi dan komunikasi, dan Kabupaten Semarang menempati posisi peringkat paling bawah. Kota Salatiga rata-rata keberadaan media informasi dan komunikasi sangat berfungsi yaitu : media cetak periodik (bulanan), kotak pengaduan, usulan dan saran di tiap kantor kelurahan, no. telp untuk sms pengaduan, usulan dan saran, akun email untuk email pengaduan, usulan dan saran, media on-line (website dan/atau akun media sosial), yakni senantiasa terkini, interaktif (bisa diakses dan direspons) oleh setiap warga, di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan, bagi kelembagaan, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Kabupaten Semarang fungsi media informasi dan komunikasi hampir sama rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang.

#### **h. Keberagaman Institusi Partisipan**

Indikator tata kelola kota berdasarkan data obyektif selain kemanfaatan media Informasi dan komunikasi adalah keberagaman institusi partisipan. Semakin tinggi keragaman latar belakang institusi dari partisipan atau keterwakilan pemangku kepentingan, yaitu kelembagaan masyarakat (LKM, LMK, Karangtaruna, PKK, Pengurus RW/RT, LSM), kelembagaan pemerintah pusat (kementerian/lembaga terkait), pemerintah lokal (dinas/sudin terkait), pengusaha/swasta (dunia usaha terkait), akademisi (bidang ilmu terkait), lembaga donor terkait, dan kesetaraan gender dalam proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, pengawasan dan evaluasi), nilainya makin tinggi. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang dalam hal keberagaman institusi partisipan memperoleh skor partisipan pembangunan terdiri dari perwakilan semua pemangku kepentingan, dan rasio perempuan dan laki-laki = 40 : 60. Hal ini menunjukkan peran wanita sebagai partisipan hampir seimbang dengan laki-laki atau sudah ada kesetaraan gender. Kabupaten Demak dalam hal keberagaman institusi partisipan memperoleh peringkat tertinggi dengan partisipan pembangunan terdiri dari perwakilan semua pemangku kepentingan, dan rasio perempuan dan laki-laki = 50:50. Persentase partisipan dalam pembangunan yang terwakili dalam pemangku kepentingan antara rasio perempuan dan laki-laki menunjukkan kesetaraan gender. Kabupaten yang menempati peringkat terendah dalam keberagaman institusi partisipan adalah Kabupaten Semarang dimana partisipan dalam pembangunan yang terwakili dalam pemangku kepentingan hanya 30:70 yang berarti kesetaraan gender masih kurang. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Tata Kelola Kota dan Data Obyektif dapat dilihat pada Tabel 5.8.



Tabel 5.8 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan Indikator Tata Kelola Kota dan Data Obyektif

Kab/kota	Indikator		
	Tata Kelola	Media Informasi dan Komunikasi	Keberagaman Institusi Partisipan
Grobogan	1	4	3
K Semarang	2	3	4
Kendal	3	2	2
Demak	4	5	1
Salatiga	5	1	5
Semarang	6	6	6

Sumber: Bappeda,2016

### 5.3.3 Urbanisasi dan Kependudukan

#### a. Kemudahan Akses Data Kependudukan

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel urbanisasi dan kependudukan berdasarkan persepsi masyarakat ada enam indikator yaitu: Kemudahan akses data kependudukan, keberadaan dan peran kelembagaan, upaya peningkatan kualitas SDM, Upaya pengendalian mobilitas penduduk, upaya pengendalian urbanisasi dan pemukiman vertikal. Kemudahan akses data kependudukan berdasarkan persepsi masyarakat Sejauh mana kemudahan yang dirasakan dalam mengetahui data kependudukan yang akurat dan terkini. Penilaian tertinggi jika hanya cukup membuka website / portal resmi pemerintah kota, semua data kependudukan yang diperlukan sudah tersedia. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metrpolitan Semarang dalam hal kemudahan akses data kependudukan dapat dengan membuka website / portal resmi pemerintah kota, untuk mengetahui tempat dan waktu pengambilan data namun belum semua data kependudukan yang diperlukan tersedia. Kota Semarang memperoleh peringkat tertinggi dan Kabupaten Kendal memperoleh peringkat terendah dalam hal kemudahan akss data kependudukan.Kabupaten/kota yang ada di wilayah metropolitan Semarang yang kemudahan akses data kependudukan di atas rata-rata hampir semua yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. Kabupaten/kota yang kemudahan akses di bawah rata-rata adalah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Kabupaten/kota di bawah rata-rata, jika akses data harus jelajahi dunia maya untuk menemukan data-data yang diperlukan.

### **b.Keberadaan dan Peran Kelembagaan**

Keberadaan dan peran kelembagaan sebagai indikator urbanisasi dan kependudukan diukur kelembagaan masyarakat apa saja kah yang ada dan berperan dalam program-program kependudukan dan masyarakat di wilayah tempat tinggal. Semakin banyak lembaga yang ada berarti semakin baik keberadaan dan peran kelembagaan. Penilaian persepsi masyarakat tertinggi jika ada dan berperansertanya pengurus RT, RW, tim penggerak PKK, karang taruna, LMK dan LKM/BKM dalam menjalankan program-program kependudukan/kemasyarakatan; serta ada dan berjalannya Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PK3). Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang dalam hal keberadaan dan peran kelembagaan ada dan berperansertanya pengurus RT, RW, tim penggerak PKK, karang taruna, LMK dan LKM/BKM dalam menjalankan program-program kependudukan/kemasyarakatan namun ada dan belum berjalannya Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PK3). Kabupaten yang menempati peringkat tertinggi dalam hal keberadaan dan peran kelembagaan adalah Kabupaten Grobogan dengan capaian ada dan berperansertanya pengurus RT, RW, tim penggerak PKK, karang taruna, LMK dan LKM/BKM dalam menjalankan program-program kependudukan/kemasyarakatan. Kabupaten Semarang menempati peringkat terbawah dalam hal keberadaan dan peran kelembagaan ada dan berperansertanya pengurus RT, RW, tim penggerak PKK, LMK dan LKM/BKM dalam menjalankan program-program kependudukan/kemasyarakatan. Karang taruna dan Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PK3) ada namun belum berjalan optimal.

### **c.Upaya peningkatan kualitas SDM**

Peningkatan kualitas SDM penting dalam pengukuran variabel urbanisasi dan kependudukan. Penilaian indikator peningkatan kualitas SDM dengan melihat upaya-upaya peningkatan kualitas manusia di wilayah RW tempat tinggal. Upaya peningkatan dilihat dengan ada dan berjalannya kegiatan Bina Ketahanan Balita dan anak (BKB), BKR, BKL,UPPKS), usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), pendidikan calistung (baca-tulis-hitung) serta pelatihan keterampilan lainnya yang dijalankan oleh LSM. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang

dalam hal peningkatan kualitas SDM ada dan berjalannya kegiatan Bina Ketahanan Balita dan anak (BKB), Bina Ketahanan Keluarga Remaja (BKR), Bina Ketahanan Lansia (BKL). Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), pendidikan calistung (baca-tulis-hitung) serta pelatihan keterampilan lainnya yang dijalankan oleh LSM berdasarkan persepsi masyarakat sebagian sudah ada namun belum optimal

Kabupaten Kendal menempati posisi peringkat tertinggi dalam hal upaya peningkatan kualitas SDM dengan keragaman ada BKB, Bina Ketahanan Keluarga Remaja (BKR), Bina Ketahanan Lansia (BKL), Usaha peningkatan Pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Kabupaten Demak menempati posisi terendah dalam upaya peningkatan kualitas SDM, berdasarkan persepsi masyarakat ada dan berjalannya kegiatan Bina Ketahanan Balita dan anak (BKB), Bina Ketahanan Keluarga Remaja (BKR), Bina Ketahanan Lansia (BKL). Kabupaten yang dalam upaya peningkatan kualitas SDM di atas rata-rata adalah Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan dan Kota Salatiga, sedangkan kabupaten/kota yang upaya peningkatan kualitas SDM di bawah rata-rata adalah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak.

#### **d. Upaya pengendalian mobilitas penduduk**

Upaya pengendalian mobilitas penduduk yang dimaksud adalah apa saja upaya-upaya yang berlangsung efektif dalam pengendalian mobilitas penduduk (dalam kota) di tiap kabupaten/kota. Pemberlakuan rayonisasi sekolah, penyediaan mess karyawan/buruh, pemenuhan standar minimal fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lingkungan di setiap kawasan permukiman, peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (tele-konfrens, dsb) adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengendalikan mobilitas penduduk. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan dalam hal upaya pengendalian mobilitas penduduk dengan pemberlakuan rayonisasi sekolah, penyediaan mess karyawan/buruh. Berdasarkan persepsi masyarakat rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang masih kurang dalam pemenuhan standar minimal fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lingkungan di setiap kawasan permukiman, peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (tele-konfrens, dsb). Kabupaten yang menempati peringkat tertinggi di kabupaten/kota di Metropolitan Semarang dalam hal adalah upaya pengendalian mobilitas penduduk adalah Kota Semarang. Kota Semarang upaya yang dilakukan

adalah pemberlakuan rayonisasi sekolah, penyediaan mess karyawan/buruh, pemenuhan standar minimal fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lingkungan di setiap kawasan permukiman. Kawasan pemukiman di Kota Semarang sangat berkembang pesat mengingat sebagai Ibukota Provinsi memiliki daya tarik bagi pendatang dari luar daerah baik alasan ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain yang mengakibatkan semakin banyaknya jumlah penduduk dan membutuhkan pemukiman.

Kabupaten/kota yang menempati peringkat terendah dalam hal upaya pengendalian mobilitas penduduk adalah Kabupaten Kendal yang berdasarkan persepsi masyarakat sudah ada pemberlakuan rayonisasi sekolah, penyediaan mess karyawan/buruh namun fasilitas umum, sosial dan lingkungan di kawasan pemukiman masih kurang. Kabupaten/kota yang upaya pengendalian mobilitas penduduk sudah di atas rata-rata adalah Kota Semarang dan kabupaten Grobogan, kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak masih di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan persepsi masyarakat masih kurang memperhatikan upaya untuk mengendalikan mobilitas penduduk dalam kota.

#### **e. Upaya Pengendalian Urbanisasi**

Upaya pengendalian urbanisasi yang dimaksud adalah apa saja upaya-upaya yang berlangsung efektif dalam pengendalian mobilitas penduduk di kota dalam hal urbanisasi dan komuter. Berdasarkan persepsi masyarakat upaya yang dapat dilakukan adalah secara berkala dilakukan operasi yustisi (razia KTP, KIPEM – Kartu Identitas Penduduk Musiman, KIK – Kartu Identitas Kerja, dll), serta Registrasi Penduduk Berbasis NIK, pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, di wilayah sekitar kota, membangun fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lingkungan di pedesaan, wilayah sekitar kota; diversifikasi usaha tani di pedesaan, wilayah sekitar kota; desa yang punya potensi budaya, sebetulnya bisa diangkat sebagai desa wisata, penguatan kelembagaan masyarakat pedesaan, di wilayah sekitar kota. Semakin banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan mobilitas penduduk melakukan urbanisasi dan komuter semakin baik penilaian masyarakat terhadap keberlanjutan kota. Rata-rata kabupaten/kota di Wilayah Metropolitan Semarang secara berkala sudah dilakukan operasi yustisi (razia KTP, KIPEM – Kartu Identitas Penduduk Musiman,

KIK – Kartu Identitas Kerja, dll), serta Registrasi Penduduk Berbasis NIK, pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, di wilayah sekitar kota, membangun fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lingkungan di pedesaan, wilayah sekitar kota, diversifikasi usaha tani di pedesaan, wilayah sekitar kota. Hal yang masih kurang adalah desa yang punya potensi budaya, sebetulnya bisa diangkat sebagai desa wisata, penguatan kelembagaan masyarakat pedesaan, di wilayah sekitar kota. Pembangunan desa berbasis metropolitan juga dapat dilakukan dengan melihat potensi yang ada.

Kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang yang menempati posisi peringkat tertinggi adalah Kabupaten Grobogan dan terendah Kabupaten Demak dalam hal upaya pengendalian mobilitas penduduk ke luar kota baik untuk tujuan urbanisasi maupun untuk tujuan komuter. Kabupaten Grobogan secara berkala dilakukan operasi yustisi (razia KTP, KIPEM – Kartu Identitas Penduduk Musiman, KIK – Kartu Identitas Kerja, dll), serta Registrasi Penduduk Berbasis NIK; pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, di wilayah sekitar kota, membangun fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lingkungan di pedesaan, wilayah sekitar kota, diversifikasi usaha tani di pedesaan, wilayah sekitar kota dan sudah ada sedikit upaya untuk memetakan potensi desa budaya untuk menjadi desa wisata budaya. Pemetaan potensi budaya ini penting untuk mengenalkan budaya lokal baik terhadap turis dalam maupun turis asing.

#### **f. Pola Pemukiman Vertikal**

Pola pemukiman yang horisontal membutuhkan lahan yang luas, sementara di perkotaan ada keterbatasan lahan yang ada untuk itu ada pemikiran mengorganisasi masyarakat untuk bisa mengubah pola pikir ke pemukiman yang vertikal yang tidak banyak membutuhkan lahan. Indikator yang digunakan dalam penilaian pola pemukiman vertikal adalah mungkinkah warga mau mengorganisasi diri untuk secara bersama-sama mengubah pola mukim dari horizontal ke vertial denga alasan-alasan tertentu. Berdasarkan persepsi masyarakat sangat mungkin, menyadari kerugian apa yang selama ini mereka alami, atau kesempatan baik apa yang luput selama ini, keuntungan apa saja yang akan mereka peroleh, dan dengan didampingi fasilitator perumahan yang komunikatif dan punya komitmen tinggi. Rata-rata kabupaten/kota di Wilayah

Metropolitan Semarang memberikan penilaian bahwa pola pikir dapat berubah hanya mungkin mau, jika mereka memahami maksud dari "pengorganisasian warga", dan menyadari kerugian yang dialami. Hal ini berarti pada saat sosialisasi dan warga memahami betapa tingkat kerugiannya jauh lebih tinggi dibandingkan tidak mau merubah pola pikir, baru masyarakat mau berubah.

Kota Salatiga menempati peringkat tertinggi dalam hal perubahan pola pikir ke pemukiman yang vertikal, berdasarkan persepsi masyarakat kemungkinan warga mau, jika mereka memahami maksud dari "pengorganisasian warga", dan menyadari kerugian yang dialami jika tidak mengubah pola pemukiman yang vertikal. Hal ini masih sangat jauh dari penilaian paling tinggi yaitu lebih berpikir dari segi kerugian belum berpikir karena alasan kesempatan baik, keuntungan apa saja yang akan mereka peroleh, dan dengan didampingi fasilitator perumahan yang komunikatif dan punya komitmen tinggi. Kabupaten yang menempati peringkat paling rendah adalah Kabupaten Kendal yang kecil kemungkinan, jika mereka belum memahami maksud dari "pengorganisasian warga" untuk merubah pola pikir yang menuju ke pemukiman vertikal. Kondisi rata-rata di kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang dalam hal pengorganisasian warga menuju pola pemukiman vertikal mengharuskan kerja keras dan setiap kabupaten/kota harus mempunyai upaya dengan cara pendekatan dan sosialisasi dan pendekatan yang intensif. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator urbanisasi dan kependudukan dan persepsi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9 Peringkat Kabupaten/Kota Di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Urbanisasi Dan Kependudukan Dan Persepsi Masyarakat

Kab/Kota	Indikator						
	Urbanisasi	Kemudahan Akses Data	Peran Kelembagaan	Peningkatan Kualitas SDM	Pengendalian Mobilitas	Pengendalian Urbanisasi	Pemukiman Vertikal
K Semarang	1	1	2	3	1	2	2
Salatiga	2	4	4	4	3	3	1
Kendal	3	6	3	1	6	5	6
Semarang	4	5	6	5	4	4	4
Grobogan	5	3	1	2	2	1	3
Demak	6	2	5	6	5	6	5

Sumber: Data Primer Persepsi Masyarakat, 2016

#### **g. Keberadaan Pengendalian Mobilitas Penduduk**

Keberadaan pengendalian mobilitas penduduk berdasarkan data obyektif yang dimaksud adalah upaya untuk mengurangi arus lalu lintas dan kemacetan, mengurangi polusi asap kendaraan bermotor dan peningkatan kualitas fasilitas lingkungan pemukiman. Semakin banyak kegiatan yang dijalankan, makin tinggi nilainya dalam hal pemberlakuan rayonisasi sekolah, penyediaan mess karyawan/buruh, pemenuhan standar minimal fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lingkungan di setiap kawasan, peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (tele-konfrens,dsb). Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang sudah memberlakukan rayonisasi sekolah, penyediaan mess karyawan/buruh, pemenuhan standar minimal fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lingkungan di setiap kawasan berdasarkan data obyektif. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang belum meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (tele-konfrens,dsb).

Kota Semarang menempati posisi peringkat tertinggi di wilayah Metropolitan Semarang dalam hal keberadaan pengendalian mobilitas penduduk. Kota Semarang sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (tele-konfrens,dsb) yang secara rata-rata kabupaten/kota belum menggunakan untuk mengendalikan mobilitas penduduk dalam kota. Kabupaten yang keberadaan pengendalian mobilitas penduduk di atas rata-rata adalah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal, sedang dua kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dalam hal keberadaan mobilitas penduduk berada dibawah rata-rata. Bahkan Kabupaten Demak yang terendah hanya pemberlakuan rayonisasi sekolah dan penyediaan mess karyawan/buruh.

#### **h. Pemenuhan Tupoksi Pengawasan Tata Ruang**

Indikator pemenuhan tupoksi kelurahan dalam upaya pengendalian penggunaan dan pengawasan tata ruang, terutama dimaksudkan sebagai pencegahan muncul dan bertambahnya usaha dan penduduk liar. Penilaian berdasarkan data obyektif jika semakin banyak kriteria yang dipenuhi makin tinggi nilainya. Adapun kriterianya adalah adanya pembagian teritori tanggungjawab kelurahan dan warga mencakup pengawasan

penggunaan lahan yang terintegrasi dengan tugas pengelolaan tata-hijau, pengelolaan sampah, fasilitas sosial, sistem pengelolaan risiko bencana, (b) adanya peta administrasi wilayah yang jelas dan tegas, termasuk batas pembagian teritori tanggungjawab, (c) adanya SOP untuk petugas di kelurahan dan kecamatan (d) Pengorganisasian warga yang menempati area-area kritis dan perbatasan untuk berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian tata-ruang wilayah. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang kriteria yang terpenuhi (a), (b),(c). Untuk kriteria (d) belum terpenuhi kecuali Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal. Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan yang masih di bawah rata-rata.

#### **i. Penyediaan Ruang Daur Hidup**

Indikator penyediaan ruang daur hidup manusia dengan penataan ruang pemukiman secara vertikal dinilai dengan tingkat pemenuhan kriteria. Semakin banyak kriteria yang dapat dipenuhi maka semakin tinggi penilaian indikator tersebut. Adapun kriteria yang harus dipenuhi adalah (a) pengembangan perumahan di arahkan secara vertikal, dengan adanya perda tentang perumahan vertikal; (b) peruntukan hijau (RTH) diperluas dengan upaya konsolidasi tanah vertikal di permukiman kampung; (c) pengorganisasian warga untuk proses perencanaan partisipatif bagi transformasi kampung horizontal menjadi kampung vertikal; (d) peremajaan, pembangunan kembali, dan pengembangan permukiman, dengan pendekatan berbasis kelembagaan masyarakat RT dan RW, sehingga komunitas lokal dapat berperan aktif. Rata-rata kabupaten/kota di Wilayah Metropolitan tingkat pemenuhan kriteria samapai (a), (b) dan (c). Kabupaten yang dapat pemenuhan kriteria di atas rata-rata adalah Kota Salatiga, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Sedangkan yang di bawah rata-rata dalam hal pemenuhan kriteria adalah Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.

Kota Salatiga menempati posisi peringkat tertinggi dengan capaian kriteria pengembangan perumahan di arahkan secara vertikal, dengan adanya perda tentang perumahan vertikal, peruntukan hijau (RTH) diperluas dengan upaya konsolidasi tanah vertikal di permukiman kampung, pengorganisasian warga untuk proses perencanaan partisipatif bagi transformasi kampung horizontal menjadi kampung vertikal, peremajaan, pembangunan kembali, dan pengembangan permukiman, dengan



pendekatan berbasis kelembagaan masyarakat RT dan RW, sehingga komunitas lokal dapat berperan aktif. Kabupaten yang terendah dalam pemenuhan kriteria penyediaan ruang daur hidup adalah Kabupaten Demak. Kriteria yang dapat dipenuhi di Kabupaten Demak berdasarkan data obyektif adalah pengembangan perumahan di arahkan secara vertikal, dengan adanya perda tentang perumahan vertikal. Peraturan berupa perda tersedia namun pelaksanaannya masih kurang optimal. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator urbanisasi dan kependudukan dan data obyektif dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Urbanisasi dan Kependudukan dan Data Obyektif

Kab/Kota	Urbanisasi	Indikator		
		Keberadaan Pengendalian Mobilitas	Pemenuhan Tupoksi	Penyediaan Ruang Daur Hidup
K Semarang	1	1	1	5
Salatiga	2	3	4	1
Kendal	3	2	3	2
Semarang	4	4	2	3
Grobogan	5	5	5	4
Demak	6	6	6	6

Sumber: Kabupaten/Kota dalam Angka dan Bappeda, 2016

### 5.3.4 Perumahan dan Pemukiman

#### a. Rumah Tidak Layak Huni

Banyaknya rumah tidak layak huni di dalam lingkungan wilayah Rukun Tetangga (RT) dapat digunakan sebagai indikator baik dan tidaknya perumahan dan pemukiman berkelanjutan. Idealnya dalam satu wilayah RT tidak ada rumah yang tidak layak huni. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang jumlah rumah yang tidak layak huni dalam satu wilayah RT ada 2 atau 3 rumah. Kabupaten yang menempati posisi peringkat tertinggi adalah Kabupaten Grobogan, dimana jumlah rumah tidak layak huni dalam satu wilayah RT hanya ada 1 rumah. Hal ini sangat bertolak belakang kalau dibandingkan dengan tingkat perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah justru Kabupaten Grobogan termasuk tingkat ekonomi rendah. Kota Semarang yang menjadi Ibukota Provinsi Jawa Tengah, jumlah rumah tidak layak huni lebih banyak dibandingkan di Kabupaten Grobogan. Kabupaten Kendal merupakan kabupaten yang menempati

peringkat terendah dalam jumlah rumah tidak layak huni. Berdasarkan persepsi masyarakat tentang rumah yang tidak layak huni perlu ada kriteria yang jelas seperti apa gambaran rumah tidak layak huni sehingga ada persamaan persepsi menurut masyarakat. Kriteria rumah tidak layak huni ini menjadi kelemahan dalam penelitian ini.

### **b. Rumah Kumuh**

Indikator lain yang dipakai dalam menjelaskan perumahan dan pemukiman dalam pembangunan berkelanjutan adalah bebas dari rumah kumuh. Bebas rumah kumuh dalam penelitian ini juga tidak ada kriteria yang jelas. Batas penilaian berdasarkan persepsi masyarakat adalah jika dalam satu Rumah Warga (RW) di setiap kelurahan tidak terdapat rumah kumuh. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang ada 1 rumah kumuh di setiap RW. Kota Semarang merupakan kota yang terbersih dari rumah kumuh dalam setiap RW dalam satu kelurahan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Metropolitan Semarang. Kabupaten yang paling banyak rumah kumuhnya adalah Kabupaten Kendal meskipun jumlahnya hampir sama dengan rata-rata kabupaten/kota yang ada di wilayah Metropolitan Semarang. Seperti di indikator rumah tidak layak huni, seluruh kabupaten/kota di wilayah Metropolitan jumlah rumah kumuh hampir sama semua. Hal ini berarti di perkotaan Semarang rumah kumuh hampir tidak ada.

### **c. Air Bersih dan Layak Minum**

Indikator lain yang digunakan untuk menilai perumahan dan pemukiman yang berkelanjutan adalah tersedianya air bersih dan layak minum. Setiap penduduk terlayani air bersih dan air layak minum. Sumber air bersih dan air minum juga menjadi penilaian. Penilaian yang paling baik terhadap air bersih dan layak minum apabila sumber air dari air leding Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Ada beberapa sumber air yang dapat digunakan yaitu sumur pantek, tidak layak minum; air kemasan paten dan/atau air kemasan isi ulang, air leding PDAM yang dijual keliling, air leding PDAM, air kemasan paten dan/atau masak air dan/atau mesin filter air, air leding PDAM; layak minum, namun kurang meyakinkan; air leding PDAM; layak minum. Penilaian paling tinggi jika menggunakan air PDAM layak minum yang bersumber dari air leding PDAM. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang adalah air leding PDAM; layak minum, namun kurang meyakinkan; air leding yang dimasak/di-treatment dengan mesin filter air. Kabupaten/kota yang menempati peringkat tertinggi adalah Kota Salatiga dalam hal air bersih dan air layak minum. Hampir semua warga telah menggunakan air leding

PDAM layak minum dan air leding PDAM . Kabupaten /kota yang peringkat terendah adalah Kabupaten Grobogan dalam hal penggunaan air layak minum dan bersih. Sebagian besar masih menggunakan air sumur yang kurang layak minum.

#### **d. Sanitasi Lingkungan**

Sanitasi lingkungan yang dimaksud adalah bagaimana pengolahan limbah manusia dan limbah rumah tangga. Berdasarkan persepsi masyarakat pengolahan limbah yang baik adalah ada toilet dalam rumah; IPAL komunal dan perangkap lemak komunal. Rata-rata kabupaten/kota di Wilayah Metropolitan Semarang dalam pengolahan limbah manusia dan limbah rumah tangganya ada toilet dalam rumah; IPAL rumahtangga dan perangkap lemak rumahtangga. Kota Semarang menempati peringkat tertinggi dalam hal pengolahan limbah manusia dan limbah rumah tangga sedangkan yang terjelek adalah Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan dalam hal pengolahan limbah manusia dan rumah tangga ada toilet dalam rumah, kadang-kadang ke MCK komunal; IPAL komunal dan perangkap lemak komunal. Kondisi secara rata-rata di seluruh kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang sudah memiliki semua toilet dalam rumah, hanya sedikit saja yang masih menggunakan MCK komunal.

#### **e. Sampah**

Produksi sampah rumah tangga dan bagaimana mengelolanya juga menjadi indikator pengukuran pemukiman dan perumahan yang berkelanjutan. Pengolahan sampah yang baik adalah sudah ada pemisahan antara sampah non-organik dipilah menurut jenisnya dan setiap bulan disetorkan ke bank sampah RW; sampah organik dimasukkan ke komposter komunal. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang dalam hal pengolahan sampah rumah tangganya adalah sampah dipilah menjadi sampah kertas, sampah plastik, sampah campuran dan sampah organik, diangkut petugas dua hari sekali. Rata-rata di semua kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang petugas sampah tidak mengambil sampah tiap hari akibatnya sampah menumpuk dan menimbulkan bau yang mengganggu lingkungan. Kabupaten Grobogan menempati peringkat tertinggi dalam hal pengolahan sampah, sampah non-organik dipilah menurut jenisnya (kertas, plastik botol, plastik cup, plastik kemasan/saset, aluminium, kaleng, besi, beling) dan setiap bulan disetorkan ke bank sampah RW; sampah organik diangkut petugas tiga atau empat hari sekali. Pengolahan sampah di Kabupaten Grobogan bertolak belakang dengan kondisi pengolahan limbah manusia dan rumah tangga serta sanitasi yang ada .Pengolahan sampah yang menempati peringkat terendah adalah Kabupaten Demak. Adapun pengolahan sampah di Kabupaten Demak

dengan cara dikumpulkan di dua tempat terpisah, tong sampah organik dan tong sampah non-organik, diangkut petugas setiap hari atau dua hari sekali. Cara ini dianggap masih kurang baik dalam pengolahan sampah karena tidak di pisah-pisah lagi berdasarkan jenis sampah.

#### **f. Sarana Lingkungan**

Sarana lingkungan di perumahan dan pemukiman merupakan salah satu indikator penilaian baik tidaknya perumahan dan pemukiman dari sisi lingkungan. Penilaian yang baik dari sisi sarana lingkungan jika dalam perumahan dan pemukiman yang dapat dicapai dari rumah dengan jalan kaki yaitu tersedia pendidikan (PAUD/TK/SD), kesehatan (posyandu/balai pengobatan/puskesmas/klinik), kantor pos, rumah ibadah, perpustakaan, pasar/minimarket, taman/RTH. Sarana lingkungan ini sebenarnya sudah menjadi sarana umum di perkotaan kecuali taman/RTH yang memang sesuai dengan sarana lingkungan yang berkelanjutan. Rata-rata kabupaten/kota di Wilayah Metropolitan Semarang telah memiliki sarana lingkungan berupa pendidikan (PAUD/TK/SD), kesehatan, rumah ibadah, pasar/minimarket yang dapat dijangkau dengan jalan kaki dari rumah. Hal ini berarti sarana lingkungan yang masih kurang di kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang adalah kantor pos, perpustakaan dan taman/RTH. Fasilitas umum tersebut sangat penting untuk publik. Kantor pos saat ini sudah banyak menggunakan kantor pos keliling yang melayani secara keliling. Taman /RTH saat ini setiap kabupaten/kota juga sudah mengusahakan agar target luasnya RTH tercapai yaitu 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Kabupaten Kendal menempati peringkat tertinggi dalam hal sarana lingkungan yang dapat dijangkau warganya dengan berjalan kaki yaitu pendidikan (PAUD/TK/SD), kesehatan, kantor pos, rumah ibadah, perpustakaan, pasar/minimarket. Kabupaten Demak menempati posisi terendah dalam sarana lingkungan yang dapat dijangkau warganya dengan jalan kaki dari rumah yaitu kesehatan (posyandu/balai pengobatan/puskesmas/klinik), rumah ibadah, pasar/minimarket. Kabupaten Demak dalam hal sarana lingkungan utama yaitu sarana pendidikan masih jauh dari jangkauan warganya dari perumahan atau pemukiman dengan berjalan kaki. Untuk itu pemerintah Kabupaten Demak perlu membangun sarana pendidikan yang dekat dengan pemukiman. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator perumahan dan pemukiman dan persepsi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Perumahan dan Pemukiman dan Kependudukan dan Persepsi Masyarakat

Kab/Kota	Perumahan	Indikator					
		Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Kumuh	Air Bersih	Sanitasi Lingkungan	Sampah	Sarana Lingkungan
K Semarang	1	2	1	2	1	2	3
Salatiga	2	3	2	1	2	3	2
Kendal	3	6	6	4	5	4	1
Demak	4	5	5	5	3	6	6
Grobogan	5	1	4	6	6	1	4
Semarang	6	4	3	3	4	5	5

Sumber: Data Primer Persepsi Masyarakat, 2016

#### g. Keluarga MBR yang Menempati Rumah Layak Huni

Berdasarkan data obyektif yang tersedia, indikator perumahan dan pemukiman adalah persentase keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapat hak bertempat tinggal yang layak. Semakin tinggi persentasenya semakin tinggi nilainya. Persentase tertinggi jika keluarga MBR menempati rumah layak huni sebesar 76% sd 100%. Keluarga MBR diasumsikan jumlahnya 60% dari total jumlah keluarga dalam suatu wilayah kota atau jumlah keluarga pra sejahtera II dan I. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang keluarga MBR yang bertempat tinggal di rumah layak huni sebesar 26% sd 50%. Hal ini menunjukkan penanganan perumahan dan pemukiman bagi keluarga MBR yang menempati rumah layak huni masih kurang optimal. Kabupaten yang menempati peringkat tertinggi dalam hal keluarga MBR yang menempati rumah layak huni adalah Kabupaten Demak sekitar 60%, dan yang terendah adalah Kabupaten Semarang sebesar 30%. Secara umum dilihat dari persentase keluarga MBR yng menempati rumah layak huni masih sangat kecil dari yang diharapkan.

#### h. Keluarga MBR yang Memperoleh Kredit

Indikator yang digunakan untuk menilai perumahan dan pemukiman yang berkelanjutan dari sisi data obyektif selain persentase keluarga MBR yang menempati rumah layak huni adalah persentase keluarga MBR yang pernah memperoleh kredit perumahan. Persentase tertinggi jika keluarga MBR yang pernah menerima kredit perumahan sebesar 76% sd 100%. Keluarga MBR diasumsikan jumlahnya 60% dari

total jumlah keluarga dalam suatu wilayah kota atau jumlah keluarga pra sejahtera II dan I. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang keluarga MBR yang pernah menerima kredit perumahan sebesar 1% sd 25%. Hal ini menunjukkan penanganan perumahan dan pemukiman bagi keluarga MBR yang berhak memperoleh kredit perumahan masih kurang optimal. Kabupaten yang menempati peringkat tertinggi dalam hal keluarga MBR yang berhak menerima kredit perumahan adalah Kota Semarang sekitar 40%, dan yang terendah adalah Kabupaten Semarang sebesar 15%. Secara umum dilihat dari persentase keluarga MBR yang berhak memperoleh kredit perumahan masih sangat kecil . Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator perumahan dan pemukiman dan data obyektif dapat dilihat pada Tabel 5.12.

Tabel 5.12 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Perumahan dan Pemukiman dan Data Obyektif

Kab/Kota	Indikator		
	Perumahan	MBR yang Layak Huni	MBR yang Memperoleh Kredit
K Semarang	1	4	1
Salatiga	2	5	4
Kendal	3	2	2
Demak	4	1	3
Grobogan	5	3	5
Semarang	6	6	6

Sumber: Kabupaten dalam Angka dan Dinas PU dan Cipta Karya, 2016

### 5.3.5 Resiko Bencana dan Perubahan Iklim

#### a. Memahami Sistem Tanggap Darurat

Indikator resiko bencana dan perubahan iklim adalah apakah sebagian besar masyarakat sudah memahami sistem tanggap darurat pada saat terjadi bencana. Berdasarkan persepsi masyarakat penilaian tertinggi jika sebagian masyarakat tahu, mempelajari, dan mempraktekannya. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang dalam hal tanggap darurat terhadap bencana menjawab sekedar tahu dan ingin mempelajarinya tapi belum pernah mempraktekkan. Kabupaten Grobogan menempati peringkat tertinggi dalam hal tanggap darurat, sebagian besar masyarakat tahu dan pernah mempelajarinya, namun belum

mempraktekannya. Kabupaten Demak berdasarkan persepsi masyarakat sebagian besar masyarakat sekedar tahu dan ingin mempelajarinya seperti di rata-rata jawaban masyarakat di seluruh kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang. Sebagian besar masyarakat di kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang belum pernah mempraktekkan karena di wilayah masing-masing relatif jarang terjadi bencana. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator resiko bencana alam dan perubahan iklim dan persepsi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Resiko Bencana Alam dan Perubahan Iklim dan Persepsi Masyarakat

Kab/Kota	Indikator	
	Resiko	Memahami Sistem Tanggap Darurat
Salatiga	1	5
K Semarang	2	2
Kendal	3	4
Demak	4	6
Semarang	5	3
Grobogan	6	1

Sumber: Data Primer Persepsi Masyarakat, 2016

#### b. Upaya Pengurangan Emisi

Upaya pengurangan emisi berdasarkan data obyektif diukur dengan persentase jumlah penduduk yang menggunakan sepeda. Penilaian tertinggi jika jumlah penduduk yang menggunakan sepeda dari seluruh jumlah penduduk sebesar 76-100%. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang yang penduduknya menggunakan sepeda untuk mengurangi emisi sebesar 30%. Hal ini dikarenakan jarak antara tempat tinggal dengan tempat bekerja, sekolah jauh dan budaya bersepeda masih sekedar bertujuan untuk olah raga. Begitu juga dengan wilayah yang dataran tinggi tidak memungkinkan untuk bersepeda sebagai sarana transportasi kemana-mana. Kabupaten Demak berdasarkan data obyektif, jumlah persentase penduduknya yang menggunakan sepeda sebagai upaya mengurangi emisi sekitar 35%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa seraca geografi Kabupaten Demak terletak di dataran rendah dengan penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian petani yang masih memungkinkan untuk menggunakan sepeda sebagai

alat transportasi. Kabupaten Grobogan meskipun penduduknya sebagian besar bermata pencaharian petani namun persentase penduduk yang menggunakan sepeda sebagai upaya mengurangi emisi paling rendah sekitar 20%. Kurangnya minat penduduk menggunakan sepeda sebagai upaya mengurangi emisi ada beberapa sebab selain jarak antara tempat tinggal dengan tempat bekerja, sekolah, panjang jalan yang dilengkapi jalur sepeda, iklim yang panas, letak geografi.

### **c. Jalur Sepeda**

Berkaitan dengan indikator upaya pengurangan emisi yang diukur dengan persentase jumlah penduduk yang menggunakan sepeda maka perlu sarana yang mendukung yaitu panjang jalan yang dilengkapi dengan jalur sepeda. Persentase panjang jalan yang dilengkapi jalur sepeda dibandingkan dengan total panjang jalan kota. Semakin tinggi persentasenya semakin bagus nilai indeks pembangunan kota berkelanjutan. Penilaian tertinggi jika persentase panjang jalan yang menggunakan jalur sepeda dari seluruh panjang jalan kota sebesar 76-100%. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang dalam hal jalur sepeda memperoleh penilaian berdasarkan data obyektif sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota perlu mempertimbangkan lagi dalam perencanaan sarana jalan yang sudah harus dilengkapi dengan jalur sepeda. Kota Salatiga menempati peringkat tertinggi dalam pengadaan jalur sepeda dengan perolehan 35%, yang berarti panjang jalan yang dilengkapi jalur sepeda hanya 35% dari seluruh panjang jalan yang ada. Kabupaten Grobogan, persentase panjang jalan jalur sepeda terhadap panjang jalan kabupaten keseluruhan paling rendah hanya sekitar 10%. Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal panjang jalan yang sudah ada jalur sepedanya sudah di atas rata-rata seluruh kabupaten/kota di Wilayah Metropolitan Semarang. Kabupaten yang panjang jalan yang ada jalur sepedanya masih di bawah rata-rata adalah kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang.

### **d. Budaya Green**

Indikator lain dari resiko bencana dan perubahan iklim adalah budaya green. Yang dimaksud budaya green adalah banyaknya komunitas peduli lingkungan yang diukur dengan persentase keberadaan perkampungan perkotaan



yang memiliki komunitas peduli lingkungan. Penilaian tertinggi jika persentase kampung kota yang memiliki komunitas peduli lingkungan dibandingkan dengan jumlah kampung kota sebesar 76-100%. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang dalam hal keberadaan komunitas peduli lingkungan sekitar 20%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya komunitas peduli lingkungan di seluruh kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang. Kota Salatiga menempati peringkat tertinggi dalam hal keberadaan komunitas peduli lingkungan dengan perolehan 35%, yang berarti dari seluruh kampung yang ada hanya 35% yang kampungnya mempunyai komunitas peduli lingkungan. Sosialisasi pentingnya budaya green dan aksi nyata perlu digalakkan agar perolehan nilai budaya green dapat meningkat setiap tahunnya. Kabupaten Semarang dalam hal keberadaan komunitas lingkungan paling rendah diantara kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang hanya 19%. Kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang yang keberadaan komunitas lingkungan di kampung di atas rata-rata adalah Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal. Kabupaten yang perolehan nilainya di bawah rata-rata dalam hal komunitas peduli lingkungan adalah Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator resiko bencana alam dan perubahan iklim dan data obyektif dapat dilihat pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Resiko Bencana Alam dan Perubahan Iklim dan Data Obyektif

	Resiko Bencana Alam dan Perubahan Iklim	Indikator		
		Upaya Pengurangan Emisi	Jalur Sepeda	Budaya Green
Salatiga	1	3	1	1
K Semarang	2	2	2	2
Kendal	3	5	3	3
Demak	4	1	4	4
Semarang	5	4	5	6
Grobogan	6	6	6	5

Sumber: Data Kabupaten dalam Angka, Dinas Perhubungan, Bappeda, 2016

### **5.3.6. Kawasan Tepi Air**

#### **a. Adanya Ruang Publik**

Salah satu indikator dari variabel kawasan tepi air adalah tersedianya ruang publik. Penilaian tertinggi berdasarkan persepsi masyarakat jika seluruh ruang publik di kawasan tepi air telah ber-promenade dan digunakan sebagai ruang terbuka aktif. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah metropolitan masih Sedikit ruang publik di kawasan tepi air telah ber-promenade dan digunakan sebagai ruang terbuka aktif. Kabupaten yang menempati peringkat tertinggi di Wilayah Metropolitan Semarang adalah Kota Semarang hampir sebagian besar ruang publik di kawasan tepi air telah ber-promenade dan digunakan sebagai ruang terbuka aktif. Kabupaten yang menempati peringkat terendah adalah kabupaten Semarang hampir tidak ada ruang publik di kawasan tepi air telah ber-promenade dan digunakan sebagai ruang terbuka aktif. Kabupaten/kota yang memiliki ruang publik di kawasan tepi air di atas rata-rata adalah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal sedangkan kabupaten/kota lainnya yaitu Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan memiliki ruang publik di kawasan tepi pantai di bawah rata-rata.

#### **b. Bebas Pemukiman Kumuh**

Berdasarkan persepsi masyarakat, indikator kawasan tepi air berkelanjutan adalah adanya kawasan tepi air yang bebas dari pemukiman kumuh. Pada umumnya daerah pinggir pantai banyak terdapat pemukiman kumuh dari para nelayan. Penilaian tertinggi berdasarkan persepsi masyarakat tertinggi jika seluruh permukiman kumuh di kawasan tepi air telah menghadap badan air. Pada umumnya pemukiman tumbuh dari pemukiman yang membelakangi tepi air sehingga membuang sampah dari belakang langsung ke pantai. Akibatnya lingkungan tepi air menjadi kotor dan kumuh. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang dalam hal pemukiman kumuh di kawasan tepi air masih ada namun sebagian kecil permukiman kumuh di kawasan tepi air meskipun telah menghadap badan air. Kabupaten yang menempati peringkat tertinggi adalah Kota Semarang dan terendah adalah kabupaten Semarang. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata dalam hal bebas pemukiman kumuh di kawasan tepi air adalah Kota Semarang

Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak sedangkan yang berada di bawah rata-rata adalah Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan dan Kota Salatiga. Hal ini menunjukkan kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang cenderung tidak ada permukiman kumuh di kawasan tepi air telah menghadap badan air. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator kawasan tepi air dan persepsi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan Indikator Kawasan Tepi Air dan Persepsi Masyarakat

Kab/Kota	Kawasan Tepi Air	Indikator	
		Adanya Ruang Publik	Bebas Pemukiman Kumuh
Demak	1	3	3
K Semarang	2	1	1
Kendal	3	5	2
Salatiga	4	2	5
Grobogan	5	4	4
Semarang	6	6	6

Sumber: Data Primer Persepsi Masyarakat, 2016

### c.Pemanfaatan Kegiatan Publik

Berdasarkan data obyektif, indikator kawasan tepi air dapat diukur dengan pemanfaatan kawasan tepi air yang digunakan untuk kegiatan publik. Cara pengukurannya dengan persentase perbandingan luas kawasan tepi air yang digunakan untuk kegiatan publik / luas total kawasan tepi air. Penilaian tertinggi jika persentase luas kawasan tepi air yang digunakan untuk kegiatan publik dibandingkan dengan total kawasan tepi air sebesar 76-100%. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang dalam hal luasnya kawasan tepi air yang digunakan untuk kegiatan publik sekitar 30%. Hal ini menunjukkan masih kurangnya luas kawasan tepi air yang digunakan untuk kegiatan publik. Kota Semarang menempati posisi tertinggi dalam hal luasnya kawasan tepi air yang digunakan untuk kegiatan publik yaitu sebesar 26 – 50 %. Sedangkan kabupaten yang menempati posisi terendah adalah Kabupaten Semarang dengan luas kawasan tepi air yang digunakan untuk kegiatan publik sebesar 13%. Kabupaten yang berada di bawah rata-rata luas kawasan tepi air yang digunakan untuk kegiatan publik

adalah Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. Kabupaten yang luas kawasan tepi air yang digunakan untuk kegiatan publik sudah di atas rata-rata adalah Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator Kawasan tepi air dan data obyektif dapat dilihat pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Kawasan Tepi Air dan Data Obyektif .

Kab/Kota	Kawasan Tepi Air	Indikator
		Pemanfaatan Kegiatan Publik
Demak	1	4
K Semarang	2	1
Kendal	3	2
Salatiga	4	3
Grobogan	5	5
Semarang	6	6

Sumber: RTRW Bappeda, 2016

### 5.3.7 Transportasi Masal

#### a. Fasilitas Jalur Sepeda

Berdasarkan persepsi masyarakat ketersediaan fasilitas jalur sepeda sebagai indikator transportasi masal yang berkelanjutan adalah hal yang penting. Masyarakat akan memberikan pendapatnya tentang ketersediaan jalur sepeda. Penilaian masyarakat akan sangat setuju jika setiap kabupaten/kota menyediakan jalur sepeda yang memadai. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan persepsi masyarakat cenderung setuju kalau setiap kabupaten/kota harus menyediakan fasilitas jalur sepeda yang memadai sebagai indikator transportasi masal yang berkelanjutan. Kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang tidak ada satupun berdasarkan persepsi masyarakat dalam hal ketersediaan fasilitas jalur sepeda yang menjawab sangat setuju, hal ini berarti perlu ada sosialisasi dan implementasi yang nyata dalam program transportasi masal yang berkelanjutan.

Kota Salatiga menempati peringkat tertinggi berdasarkan persepsi masyarakat dalam hal ketersediaan fasilitas jalur sepeda yang memadai. Masyarakat di Kota Salatiga cenderung sangat setuju bahwa pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan fasilitas tersebut. Kabupaten Semarang menempati posisi terendah berdasarkan persepsi masyarakat dalam hal ketersediaan fasilitas jalur sepeda yang memadai karena cenderung tidak setuju ada fasilitas tersebut mengingat secara geografi berada di dataran yang tinggi.

#### **b. Angkutan Umum**

Indikator lain yang dapat menjelaskan transportasi massal berdasarkan persepsi masyarakat selain ketersediaan jalur sepeda adalah pelayanan angkutan umum massal yang dapat diandalkan. Penilaian tertinggi masyarakat terhadap fasilitas angkutan umum secara massal yang memadai apabila jawaban masyarakat sangat setuju. Rata-rata kabupaten/Kota di wilayah Metropolitan Semarang setuju bahwa pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan fasilitas angkutan massal yang memadai. Hal ini menunjukkan antusias masyarakat terhadap hadirnya transportasi massal yang berkelanjutan yang dapat dijadikan modal pengembangan transportasi berkelanjutan di wilayah Metropolitan Semarang. Kota Salatiga menempati peringkat tertinggi dalam hal persepsi masyarakat tersedianya angkutan massal. Masyarakat di Kota Salatiga rata-rata setuju kalau pemerintah harus menyediakan angkutan massal yang memadai. Kabupaten Demak menempati posisi terendah dalam persepsi masyarakat tentang tersedianya angkutan massal yang memadai yaitu cenderung tidak setuju. Hal ini disebabkan karena wilayah geografis Kabupaten Demak yang terletak di daerah pantura yang terlewati jalan utama sehingga sudah dirasakan cukup dengan adanya angkutan massal saat ini yang tersedia. Tersedianya angkutan massal yang memadai dan berkelanjutan tentunya akan menambah biaya transportasi. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator transportasi massal dan persepsi masyarakat dilihat pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Transportasi Masal dan Persepsi masyarakat

Kab/Kota	Transportasi Masal	Indikator	
		Fasilitas Jalur Sepeda	Angkutan Masal
Grobogan	1	2	2
Salatiga	2	1	1
Demak	3	5	6
Kendal	4	4	4
Semarang	5	6	5
K Semarang	6	3	3

Sumber: Data Primer Persepsi Masyarakat, 2016

### c. Kendaraan Tidak bermotor

Berdasarkan data obyektif indikator transportasi masal adalah keberadaan upaya mendorong penggunaan kendaraan tidak bermotor atau rendah karbon. Penilaian tertinggi jika Semakin sedikit jumlah kepemilikan kendaraan bermotor (penjumlahan kepemilikan motor dan mobil) perkapita atau per orang semakin baik nilai skor yang dihasilkan. Asumsi 1 kk terdiri dari 4 orang. Jika jumlahnya  $\leq 0,25$  kepemilikan kendaraan motor dan mobil per kapita artinya setiap keluarga memiliki 1 kendaraan bermotor (dapat mobil mobil atau motor). Jika setiap keluarga lebih dari 1 kendaraan bermotor yang dimiliki akan memperoleh penilaian yang rendah. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang dalam 1 keluarga memiliki lebih dari 1 kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan transportasi masal di wilayah Metropolitan Semarang belum rendah emisi karena masih banyaknya 1 keluarga yang memiliki lebih dari 1 kendaraan bermotor baik mobil maupun kendaraan roda 2. Peringkat tertinggi yang paling banyak keluarga menggunakan kendaraan bermotor adalah Kabupaten Grobogan sedangkan yang terendah artinya sudah mulai berpikir tentang transportasi masal yang rendah emisi adalah Kota Semarang. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator transportasi masal dan data obyektif dilihat pada Tabel 5.18.

Tabel 5.18 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan Indikator Transportasi Masal dan Data Obyektif

Kab/Kota	Transportasi	Indikator
		Kendaraan Tidak Bermotor
Grobogan	1	1
Salatiga	2	3
Demak	3	2
Kendal	4	5
Semarang	5	4
K Semarang	6	6

Sumber: Kabupaten dalam Angka, Dinas Perhubungan, 2106

### 5.3.8 Ekonomi Lokal dan Sektor Informal

#### a. Pengembangan ekonomi lokal dan sektor informal

Berdasarkan persepsi masyarakat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ekonomi ekonomi lokal dan sektor informal adalah apakah pemerintah kota sudah mengembangkan ekonomi lokal dan sektor informal. Jika masyarakat umum menjawab sangat setuju artinya pemerintah kota sudah terlibat aktif dalam pengembangan ekonomi lokal dan sektor informal. Rata-rata persepsi masyarakat di kabupaten/kota di wilayah Metripolitan menjawab setuju, yang berarti memang pemerintah kota sudah terlibat aktif dalam pengembangan ekonomi lokal dan sektor informal. Kabupaten Grobogan menurut masyarakat menempati peringkat tertinggi dalam hal keterlibatan pemerintah mengembangkan ekonomi lokal dan sektor informal. Kabupaten Grobogan sebagian besar mata pencaharian penduduknya di bidang pertanian, tentunya ekonomi lokal yang dikembangkan juga dalam bidang pertanian. Menurut masyarakat umum kabupate /kota di wilayah Metropolitan yang paling rendah keterlibatan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal dan sektor informal adalah Kabupaten Demak. Hal ini menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten Demak untuk lebih terlibat dalam mengembangkan ekonomi lokal dan sektor informal. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator ekonomi lokal dan sektor informal dan persepsi masyarakat dilihat pada Tabel 5.19

Tabel 5.19 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Ekonomi Lokal dan Sektor Informal dan Persepsi Masyarakat

Kab/Kota	Ekonomi Lokal	Pengembangan Ekonomi Lokal
Salatiga	1	3
Kendal	2	2
K Semarang	3	4
Semarang	4	5
Grobogan	5	1
Demak	6	6

Sumber: Data Persepsi Masyarakat, 2016

### c. Keberadaan Industri Kecil

Indikator ekonomi lokal dan sektor informal berdasarkan data obyektif dapat diukur dengan keberadaan industri kecil (industri kreatif dan atau industri rumah tangga) cara pengukurannya dengan persentase industri kecil dibandingkan dengan jumlah total industri atau jumlah industri kecil (jumlah industri kreatif dan/atau industri rumah tangga/total jumlah industri di kota) x 100%. Penilaian tertinggi jika persentase industri kecil dibandingkan dengan total industri yang ada di kota 76-100%. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang sekitar 30%, hal ini berarti masih lebih banyak industri sedang dan besar dibandingkan keberadaan industri kecil. Kabupaten/kota yang tertinggi persentase jumlah industri kecil dibandingkan total industri yang ada disetiap kabupaten/kota adalah Kota Salatiga sekitar 40%. Kabupaten/kota yang terendah dalam hal jumlah industri kecil dibandingkan total industri yang ada adalah Kabupaten Grobogan hanya 20% dari total industri yang ada. Kabupaten/kota yang keberadaan industri kecilnya di atas rata-rata adalah Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Kabupaten/kota yang keberadaan industri kecilnya di bawah rata-rata adalah Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Kabupaten yang memiliki industri di atas rata-rata pada dasarnya adalah kota industri sehingga pengembangan industrinya lebih pesat dibandingkan kabupaten/kota yang basic ekonominya adalah pertanian. Kabupaten/kota yang basic ekonominya bidang pertanian dapat



mengembangkan menjadi desa agropolitan yaitu kawasan pedesaan yang basis ekonomi pertanian namun dikembangkan menjadi industri.

#### d. Keberadaan Ruang Publik Sektor Informal

Indikator Keberadaan ruang publik sektor informal yang dimaksud adalah persentase luas ruang publik untuk sektor informal. Cara penghitungannya dengan membandingkan luas ruang publik yang digunakan untuk sektor informal dibagi total luas ruang publik. Penilaian tertinggi jika persentasenya 76-100%. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang luas ruang publik yang digunakan untuk sektor informal sebesar 31%. Kota Salatiga menempati peringkat tertinggi dan Kabupaten Demak peringkat terendah. Peringkat ini konsisten dengan jumlah industri kecil yang ada di kedua kabupaten/kota tersebut. Keberadaan sektor informal harus mulai di tata penempatannya sehingga akan berkembang. Penempatan sektor informal di ruang publik akan lebih menguntungkan bagi peningkatan pendapatan yang bergerak di sektor informal. Peningkatan pendapatan, jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator ekonomi lokal dan sektor informal dan data obyektif dapat dilihat pada Tabel 5.20

Tabel 5.20 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Ekonomi Lokal dan Sektor informal dan Data Obyektif

Kab/Kota	Ekonomi Lokal	Indikator	
		Industri kecil	Sektor Informal
Salatiga	1	1	1
Kendal	2	2	3
K Semarang	3	3	4
Semarang	4	4	2
Grobogan	5	6	5
Demak	6	5	6

Sumber: Dinas Perindustrian, Dinas Pertamanan dan Bappeda, 2016

### **5.3.9 Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka dan Kearifan Lokal**

#### **a. Apresiasi Terhadap Warisan Budaya**

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pelestarian warisan budaya adalah apresiasi terhadap warisan budaya. Yang dimaksud apresiasi terhadap warisan budaya adalah apakah masyarakat sudah memiliki apresiasi, melindungi, dan merevitalisasi warisan budaya, pusaka alam, dan kearifan lokal. Penilaian tertinggi terhadap apresiasi jika seluruh masyarakat aktif melindungi dan merevitalisasi warisan budaya, pusaka alam, dan kearifan lokal yang ada. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan persepsi masyarakat dalam mengapresiasi warisan budaya sebagian besar masyarakat aktif melindungi dan merevitalisasi warisan budaya, pusaka alam, dan kearifan lokal yang ada, meskipun belum seluruh masyarakat aktif. Capaian ini merupakan capaian yang bagus. Kabupaten /kota yang masyarakatnya telah mengapresiasi warisan budaya di atas rata-rata kabupten/kota di wilayah Metropolitan Semarang adalah Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan dalam hal apresiasi terhadap warisan budaya masyarakatnya hampir seluruhnya sudah aktif melindungi dan merevitalisasi warisan budaya, pusaka alam, dan kearifan lokal yang ada. Kabupaten yang paling rendah dalam mengapresiasi warisan budaya adalah Kabupaten Demak. Kabupaten Demak kalau dilihat dari sisi budaya dikenal sebagai kota wali dan banyak turis lokal maupun asing yang berkunjung ke kabupaten Demak karena ada masjid Demak yang sangat terkenal, namun masyarakat kabupaten Demak sendiri kurang mengapresiasi. Hal ini disebabkan karena merasa sudah terbiasa dengan budaya yang ada sehingga kurang mengapresiasi.

#### **b. Perlindungan terhadap Warisan Budaya**

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai variabel pelestarian budaya adalah sejauhmana masyarakat tau bahwa bangunan cagar budaya yang ada sudah seluruhnya terlindungi dan terawat. Penilaian tertinggi berdasarkan persepsi masyarakat jika bangunan cagar budaya terlindungi dan terawat dengan baik. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang bangunan cagar budaya masih banyak keberadaannya, namun tidak terawat. Hasil persepsi masyarakat ini menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam hal perawatan sehingga

dapat memperkaya budaya dan sejarah warisan budaya. Kabupaten/kota yang menempati peringkat tertinggi adalah Kota Semarang dan terendah adalah Kabupaten Grobogan. Kota Semarang bangunan cagar budaya masih banyak keberadaannya, namun kurang terawat artinya sudah ada perawatan tapi belum optimal. Kabupaten Grobogan berdasarkan persepsi masyarakat dalam hal perawatan warisan budaya bangunan cagar budaya sudah sedikit keberadaannya, dan tidak terawat. Kabupaten /kota yang perlindungan terhadap warisan budaya di atas rata-rata adalah Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, sedangkan yang perlindungan terhadap warisan budaya di bawah rata-rata berdasarkan persepsi masyarakat adalah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator Pelestarian warisan, pusaka alam, kearifan lokal dan persepsi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.21

Tabel 5.21 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Pelestarian Warisan, Pusaka Alam, Kearifan Lokal dan Persepsi Masyarakat

Kab/Kota	Indikator		
	Pelestarian	Apresiasi Terhadap Warisan Budaya	Perlindungan Terhadap Warisan Budaya
Demak	1	6	2
Salatiga	2	3	3
K Semarang	3	2	1
Semarang	4	5	5
Grobogan	5	1	6
Kendal	6	4	4

Sumber: Data Primer Persepsi Masyarakat, 2016

### c. Eksistensi dan Peran Komunitas Pelestarian

Berdasarkan data obyektif untuk indikator pelestarian warisan, pusaka alam, kearifan lokal adalah esistensi dan peran komunitas pelestarian warisan budaya, pusaka alam dan kearifan lokal. Pengukurannya dengan  $(\text{jumlah komunitas pelestari pusaka alam dan budaya yang aktif} / \text{total jumlah komunitas pelestari pusaka alam dan budaya}) \times 100\%$ . Semakin tinggi persentasenya semakin baik indikator pelestarian warisan budaya. Penilaian tertinggi jika persentase jumlah komunitas pelestarian yang aktif 76-100%. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah

Metropolitan Semarang persentase jumlah komunitas pelestarian yang aktif sekitar 20%. Hal ini menunjukkan masih kurangnya eksistensi komunitas pelestarian waisan budaya, pusaka dan kearifan lokal yang aktif. Kabupaten yang memiliki komunitas pelestarian yang aktif di atas rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang adalah Kabupaten Demak dan Kota Salatiga, sedangkan yang persentase komunitas pelestarian warisan budaya, pusaka dan kearifan lokal di bawah rata-rata adalah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan. Jika dilihat kabupaten/kota yang masih di bawah rata-rata dalam hal pelestarian warisan budaya, pusaka dan kearifan lokal lebih banyak dibandingkan yang di atas rata-rata menunjukkan sangat kurangnya perhatian kabupaten/kota dalam hal pelestarian warisan budaya, pusaka dan kearifan lokal.

#### **d. Peningkatan ekonomi lokal**

Indikator lain yang dapat dijadikan ukuran Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka dan Kearifan Lokal adalah peningkatan ekonomi lokal akibat warisan budaya, pusaka alam dan kearifan lokal yang berkembang. Cara pengukurannya dengan persentase jumlah agen wisata, tour wisata, dan sejenisnya yang menawarkan paket wisata terkait dengan warisan budaya, pusaka alam, dan kearifan lokal yang ada / jumlah total agen wisata x 100%. Penilaian tertinggi jika persentase jumlah agen wisata, tour wisata, dan sejenisnya yang menawarkan paket wisata terkait dengan warisan budaya, pusaka alam, dan kearifan lokal yang ada / jumlah total agen wisata x 100% sebesar 76-100%. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang persentase jumlah agen wisata yang menawarkan paket wisata terkait dengan warisan budaya, pusaka dan kearifan lokal sebesar 32%. Kabupaten /kota di wilayah Metropolitan Semarang yang persentase jumlah agen wisata yang menawarkan paket warisan budaya, pusaka dan kearifan lokal adalah Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang, selainnya yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kendal di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan masih kurangnya pemerintah kota memperhatikan dalam pelestarian warisan budaya, pusa dan kearifan lokal. Kabupaten Demak adalah kabupaten yang tertinggi dalam persentase jumlah agen wisata yang menawarkan paket wisata

warisan budaya, pusaka dan kearifan lokal sebesar 50% sedangkan Kabupaten Kendal peringkat paling bawah sebesar 20 %. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator Pelestarian warisan, pusaka alam, kearifan lokal dan data obyektif dapat dilihat pada Tabel 5.22

Tabel 5.22 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Pelestarian Warisan, Pusaka Alam, Kearifan Lokal dan Data Obyektif

Kab/Kota	Indikator		
	Pelestarian	Peran Komunitas	Peningkatan Ekonomi Lokal
Demak	1	2	2
Salatiga	2	1	4
K Semarang	3	3	3
Semarang	4	5	1
Grobogan	5	4	5
Kendal	6	6	6

Sumber: Data Sekunder Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016

### 5.3.10 Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi

#### a. Penggunaan Tanaman Hortikultura

Berdasarkan persepsi masyarakat, salah satu indikator ruang terbuka hijau, emisi dan energi adalah penggunaan tanaman hortikultura. Pengukuran penggunaan tanaman hortikultura adalah apakah apakah kampung di kota tempat tinggal sudah menggunakan tanaman hortikultura untuk pohon peneduh. Penilaian tertinggi jika seluruh kampung kota telah menggunakan tanaman hortikultura untuk pohon peneduh. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang sudah sebagian kampung kota telah menggunakan tanaman hortikultura untuk pohon peneduh. Kabupaten/kota yang sudah menggunakan tanaman hortikultura untuk pohon peneduh di atas rata-rata adalah Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan sedangkan Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kota Salatiga berada di bawah rata-rata. Masih sedikitnya kabupaten/kota yang menggunakan tanaman hortikultura untuk pohon peneduh akan mempengaruhi keberlanjutan kota terutama dari sisi lingkungan. Kabupaten Grobogan menempati

peringkat tertinggi sebagian besar kampung kota telah menggunakan tanaman hortikultura untuk pohon peneduh. Kabupaten yang menempati peringkat terendah adalah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang sedikit kampung kota yang menggunakan tanaman hortikultura untuk pohon peneduh.

#### **b. Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara**

Ketersediaan ruang terbuka hijau yang terpelihara merupakan indikator bahwa keberlanjutan kota dapat dikatakan baik. Penilaian tertinggi jika RTH tersedia dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi yang terpelihara. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang dalam hal ketersediaan RTH tersedia dalam jumlah yang belum cukup, namun terpelihara dengan baik. Peraturan tentang RTH seharusnya setiap kabupaten/kota minimal 20 % tersedia RTH publik dan 10% RTH privat. Melihat rata-rata yang dicapai kabupaten/kota menunjukkan persyaratan minimum luasnya RTH belum terpenuhi. Kabupaten/kota yang ketersediaan RTH di atas rata-rata adalah Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, sedangkan yang di bawah rata-rata adalah Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Grobogan. Kota Salatiga menduduki peringkat tertinggi yaitu RTH tersedia dalam jumlah yang sudah mencukupi, namun dalam kondisi tidak terpelihara. Kabupaten Demak ada pada peringkat terendah dalam hal ketersediaan RTH yaitu tersedia, namun belum cukup dan dalam kondisi kurang terpelihara. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi dan persepsi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.23

Tabel 5.23 Peringkat Kabupaten/Kota Di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator RTH, Emisi Dan Energi Dan Persepsi Masyarakat

Kabupaten/Kota	RTH	Indikator	
		Tanaman Hortikultura	RTH Terpelihara
K Semarang	1	2	2
Kendal	2	3	5
Salatiga	3	4	1
Demak	4	5	6
Grobogan	5	1	4
Semarang	6	6	3

Sumber: Data Primer Persepsi Masyarakat, 2016

### **c. Keberadaan Komunitas Hijau**

Berdasarkan data obyektif yang digunakan untuk mengukur indikator Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi dengan mengukur jumlah komunitas hijau / jumlah total komunitas yang ada di kota x 100%. Penilaian tertinggi jika jumlah komunitas hijau / jumlah total komunitas yang ada di kota sebesar 76-100%. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang jumlah komunitas hijau sebesar 32%. Kabupaten/kota yang persentase komunitas hijaunya di atas rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang adalah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kota Salatiga. Kabupaten/kota yang persentase komunitas hijau di bawah rata-rata adalah Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan. Kota Salatiga menempati peringkat tertinggi dalam hal persentase komunitas hijau yaitu sebesar 49% sedangkan peringkat terendah kabupaten Grobogan dengan persentase 20%. Hasil indikator keberadaan komunitas hijau menunjukkan bahwa komunitas hijau masih perlu ditingkatkan di masing-masing kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang jika menginginkan kota berkelanjutan. Peran komunitas hijau dalam masyarakat akan sangat membantu mensosialisasikan kampanye hijau kepada masyarakat.

### **d. Eksistensi kebijakan**

Eksistensi kebijakan yang menjamin keberadaan kualitas dan kuantitas RTH berdasarkan data obyektif dengan menilai Keragaman poin yang diatur dalam kebijakan yang menjamin keberadaan kualitas dan kuantitas RTH, yang seharusnya meliputi: kuantitas RTH, kualitas RTH, perencanaan RTH, pemanfaatan RTH, pemeliharaan RTH, pengelolaan RTH. Penilaian tertinggi jika terdapat 4 poin kebijakan RTH. Rata-rata kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang memiliki kebijakan yang berkaitan dengan RTH terdapat 3 poin kebijakan RTH. Kabupaten /kota yang memiliki poin kebijakan di atas rata-rata adalah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, sedangkan yang di bawah rata-rata adalah Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga. Kota Semarang memiliki 4 poin kebijakan berkaitan dengan RTH, sedangkan Kabupaten Demak terendah hanya memiliki 2 poin kebijakan berkaitan dengan RTH. Secara lengkap peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan

indikator Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi dan data obyektif dapat dilihat pada Tabel 5.24

Tabel 5.24 Peringkat Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Semarang Berdasarkan Indikator Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi dan Data Obyektif

Kab/Kota	RTH	Indikator	
		Komunitas Hijau	Eksistensi Kebijakan
K Semarang	1	4	1
Kendal	2	3	2
Salatiga	3	1	3
Demak	4	2	6
Grobogan	5	6	5
Semarang	6	5	4

Sumber: Bappeda, Dinas PU dan Cipta Karya, Dinas Pertamanan, 2016

#### 5.4 Neraca Daya Saing Kabupaten/Kota Berdasarkan Faktor Keunggulan(Advantage) dan Kelemahan(Disadvantage)

Berdasarkan peringkat dalam masing-masing indikator, maka dapat disusunlah advantage dan disadvantage kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang. Acuan yang digunakan dari hasil inventarisasi faktor-faktor atau variabel yang secara relatif menjadi kekuatan atau kelemahan suatu kabupaten/kota dalam mencapai daya saing. Pengertian relatif diartikan sebagai advantage dan disadvantage dari suatu kabupaten/kota terhadap variabel-variabel lainnya dan perbandingan terhadap kabupaten/kota lainnya. Ukuran relatif adalah nilai rata-rata peringkat kabupaten/kota dibandingkan dengan seluruh wilayah metropolitan Semarang.

##### 5.4.1 Kota Semarang

Peringkat Keseluruhan	1
Peringkat Menurut Indikator Utama	
Kepemimpinan Kota	2
Tata Kelola Kota	2
Urbanisasi dan Kependudukan	1
Perumahan dan Pemukiman	1
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	2



Kawasan Tepi Air	2
Transportasi Masal	6
Ekonomi Lokal dan Sektor Informal	3
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	3
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	1

### **Neraca Daya Saing Daerah**

#### **Keunggulan/Advantage Berdasarkan Persepsi Masyarakat**

Variabel	Peringkat
<b>Kepemimpinan Kota</b>	
a. Kualitas	2
b. Kedekatan	2
c. Koordinasi	2
d. Perubahan Ekonomi	2
e. Perubahan Sosial Budaya	2
f. Perubahan Fisik Lingkungan	2
<b>Tata Kelola Kota</b>	
a. Perijinan	1
b. Partisipasi Usulan	2
c. Partisipasi Rancangan	2
d. Partisipasi Pengadaan	2
e. Partisipasi Pengawasan	2
f. Keberadaan lembaga keswadaayaan masyarakat	2
<b>Urbanisasi dan Kependudukan</b>	
a. Kemudahan akses data kependudukan	1
b. Keberadaan dan peran kelembagaan	2
c. Upaya peningkatan kualitas SDM	3
d. Upaya pengendalian mobilitas penduduk	1
e. Upaya pengendalian urbanisasi	2
f. Pemukiman vertikal	2
<b>Perumahan dan Pemukiman</b>	
a. Rumah tidak layak huni	2

b.	Rumah kumuh	1
c.	Air bersih dan layak minum	2
d.	Sanitasi lingkungan	1
e.	Sampah	2
f.	Sarana lingkungan	3
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim		
a.	Tanggap darurat	2
Kawasan Tepi Air		
a.	Adanya ruang publik	1
b.	Bebas perumahan kumuh	1
Transportasi Masal		
a.	Angkutan umum	3
Ekonomi Lokal dan Sektor Informal		
a.	Pengembangan ekonomi lokal	4
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal		
a.	Apresiasi terhadap warisan budaya	2
b.	Perlindungan terhadap warisan budaya	1
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi		
a.	Penggunaan tanaman hortikultura	2
b.	RTH yang terpelihara	2
<b>Kelemahan/ Disadvantage Berdasarkan Persepsi Masyarakat</b>		
Transportasi Masal		
a.	Fasilitas jalur sepeda	3
<b>Keunggulan/Advantage Berdasarkan Data Obyektif</b>		
Kepemimpinan Kota		
a.	Visi	2
Urbanisasi dan Kependudukan		
a.	Keberadaan pengendalian mobilitas penduduk	1
b.	Pemenuhan tupoksi	1
Perumahan dan Pemukiman		
a.	MBR yang menerima kredit perumahan	1

Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	
a.    Pengurangan emisi	2
b.    Jalur sepeda	2
c.    Budaya green	2
Kawasan Tepi Air	
a.    Pemanfaatan kegiatan publik	1
Ekonomi Lokal dan Sektoral	
a.    Keberadaan industri kecil	3
b.    Keberadaan ruang publik sektor informal	4
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	
a.    Eksistensi kebijakan	1
<b>Kelemahan/ Disadvantage Berdasarkan Data Obyektif</b>	
Tata Kelola Kota	
a.    Media Informasi dan komunikasi	3
b.    Keberagaman institusi partisipan	4
Urbanisasi dan Kependudukan	
a.    Penyediaan ruang daur hidup	5
Perumahan dan Pemukiman	
a.    MBR yang tempat tinggalnya layak	4
Transportasi Masal	
a.    Kendaraan tidak bermotor	6
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	
a.    Eksistensi dan peran komunitas	3
b.    Peningkatan ekonomi lokal	3
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	
a.    Keberadaan komunitas hijau	4
<b>5.4.2 Kabupaten Grobogan</b>	
Peringkat Keseluruhan	2
Peringkat Menurut Indikator Utama	
Kepemimpinan Kota	1
Tata Kelola Kota	1

Urbanisasi dan Kependudukan	5
Perumahan dan Pemukiman	5
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	6
Kawasan Tepi Air	5
Transportasi Masal	1
Ekonomi Lokal dan Sektor Informal	5
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	5
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	5

### **Neraca Daya Saing Daerah**

#### **Keunggulan/Advantage Berdasarkan Persepsi Masyarakat**

Variabel	Peringkat
<b>Kepemimpinan</b>	
a. Kualitas	1
b. Kedekatan	1
c. Koordinasi	1
d. Perubahan Ekonomi	1
e. Perubahan Sosial Budaya	1
f. Perubahan Fisik Lingkungan	1
<b>Tata Kelola Kota</b>	
a. Perijinan	3
b. Partisipasi Usulan	1
c. Partisipasi Rancangan	1
d. Partisipasi Pengadaan	1
e. Partisipasi Pengawasan	1
f. Keberadaan lembaga keswadaayaan masyarakat	1
<b>Urbanisasi dan Kependudukan</b>	
a. Kemudahan akses data kependudukan	3
b. Keberadaan dan peran kelembagaan	1
c. Upaya peningkatan kualitas SDM	2
d. Upaya pengendalian mobilitas penduduk	2

e. Upaya pengendalian urbanisasi	1
f. Pemukiman vertikal	3
Perumahan dan Pemukiman	
a. Rumah tidak layak huni	1
b. Rumah kumuh	4
c. Sampah	1
d. Sarana lingkungan	4
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	
a. Tanggap darurat	1
Transpostasi Masal	
a. Fasilitas jalur sepeda	2
b. Angkutan umum	2
Ekonomi Lokal dan Sektor Informal	
a. Pengembangan ekonomi lokal	1
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	
a. Apresiasi terhadap warisan budaya	1
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	
a. Penggunaan tanaman hortikultura	1
<b>Kelemahan/ Disadvantage Berdasarkan Persepsi Masyarakat</b>	
Perumahan dan Pemukiman	
a. Air bersih dan layak minum	6
b. Sanitasi lingkungan	6
Kawasan Tepi Air	
a. Adanya ruang publik	4
b. Bebas perumahan kumuh	4
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	
a. Perlindungan terhadap warisan budaya	6
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Hijau	
a. Ruang terbuka hijau yang terpelihara	4
<b>Keunggulan/Advantage Berdasarkan Data Obyektif</b>	
Kepemimpinan Kota	

a. Visi	1
Tata Kelola Kota	
a. Keberagaman institusi partisipan	3
Perumahan dan Pemukiman	
a. MBR yang tempat tinggalnya layak	3
Transportasi masal	
a. Kendaraan tidak bermotor	1
<b>Kelemahan/ Disadvantage Berdasarkan Data Obyektif</b>	
Tata Kelola Kota	
a. Media Informasi dan komunikasi	4
Urbanisasi dan Kependudukan	
a. Keberadaan pengendalian mobilitas penduduk	5
b. Pemenuhan tupoksi	4
c. Penyediaan ruang daur hidup	4
Perumahan dan Pemukiman	
a. MBR yang menerima kredit perumahan	5
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	
a. Pengurangan emisi	6
b. Jalur sepeda	6
c. Budaya green	5
Kawasan Tepi	
a. Pemanfaatan kegiatan publik	5
Ekonomi Lokal dan Sektor Informal	
a. Keberadaan industri kecil	6
b. Keberadaan ruang publik sektor informal	5
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	
a. Eksistensi dan peran komunitas	4
b. Peningkatan ekonomi lokal	5
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	
a. Keberadaan komunitas hijau	6
b. Eksistensi kebijakan	4

### 5.4.3 Kota Salatiga

Peringkat Keseluruhan	3
Peringkat Menurut Indikator Utama	
Kepemimpinan Kota	3
Tata Kelola Kota	5
Urbanisasi dan Kependudukan	2
Perumahan dan Pemukiman	2
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	1
Kawasan Tepi Air	4
Transportasi Masal	2
Ekonomi Lokal dan Sektor Informal	1
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	2
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	3

### Neraca Daya Saing Daerah

#### Keunggulan/Advantage Berdasarkan Persepsi Masyarakat

Variabel	Peringkat
Kepemimpinan Kota	
a. Kualitas	3
b. Perubahan Sosial Budaya	3
c. Perubahan Fisik Lingkungan	3
Tata Kelola Kota	
a. Perijinan	4
b. Partisipasi Usulan	5
c. Partisipasi Rancangan	6
d. Partisipasi Pengadaan	6
e. Partisipasi Pengawasan	6
f. Keberadaan lembaga keswadayaan masyarakat	4
Urbanisasi dan Kependudukan	
a. Kemudahan akses data kependudukan	4
b. Upaya peningkatan kualitas SDM	4

c.	Upaya pengendalian urbanisasi	3
d.	Pemukiman vertikal	1
Perumahan dan Pemukiman		
a.	Rumah tidak layak huni	3
b.	Rumah kumuh	2
c.	Air bersih dan layak minum	1
d.	Sanitasi lingkungan	2
e.	Sarana lingkungan	2
Transportasi Masal		
a.	Fasiliatas Jalur Sepeda	1
b.	Angkutan umum	1
Ekonomi Lokal dan Sektor Informal		
c.	Pengembangan ekonomi lokal	3
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal		
a.	Apresiasi terhadap warisan budaya	3
b.	Perlindungan terhadap warisan budaya	3
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi		
a.	RTH yang terpelihara	1
<b>Kelemahan/ Disadvantage Berdasarkan Persepsi Masyarakat</b>		
Kepemimpinan		
a.	Kedekatan	6
b.	Koordinasi	5
c.	Perubahan Ekonomi	3
Urbanisasi dan Kependudukan		
a.	Keberadaan dan peran kelembagaan	4
b.	Upaya pengendalian mobilitas penduduk	3
Perumahan dan Pemukiman		
a.	Sampah	3
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim		
a.	Tanggap Darurat	5
Kawasan Tepi Air		



a.	Adanya Ruang Publik	2
b.	Bebas Pemukiman Kumuh	5
	Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	
a.	Penggunaan Tanaman Hortikultura	4

### **Keunggulan/Advantage Berdasarkan Data Obyektif**

#### Tata Kelola Kota

a.	Media Informasi dan komunikasi	1
----	--------------------------------	---

#### Urbanisasi dan Kependudukan

a.	Keberadaan pengendalian mobilitas penduduk	3
b.	Pemenuhan tupoksi	4
c.	Penyediaan Daur Ulang	1

#### Resiko Bencana dan Perubahan Iklim

d.	Pengurangan emisi	3
e.	Jalur sepeda	1
f.	Budaya green	1

#### Transportasi Masal

a.	Kendaraan Tidak Bermotor	3
----	--------------------------	---

#### Ekonomi Lokal dan Sektoral

c.	Keberadaan industri kecil	1
d.	Keberadaan ruang publik sektor informal	1

#### Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka dan Kearifan Lokal

a.	Eksistensi dan Peran Komunitas Pelestarian	1
----	--	---

#### Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi

b.	Keberadaan Komunitas Hijau	1
----	----------------------------	---

### **Kelemahan/ Disadvantage Berdasarkan Data Obyektif**

#### Kepemimpinan

a.	Visi	4
----	------	---

#### Tata Kelola Kota

a.	Keberagaman institusi partisipan	5
----	----------------------------------	---

#### Perumahan dan Pemukiman

a.	MBR yang tempat tinggalnya layak	5
----	----------------------------------	---

b. MBR yang memperoleh kredit	4
Kawasan Tepi Air	
a. Pemanfaatan Kegiatan Publik	3
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	
a. Peningkatan Ekonomi Lokal	4
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	
a. Eksistensi Kebijakan	3

#### **5.4.4 Kabupaten Kendal**

Peringkat Keseluruhan	4
Peringkat Menurut Indikator Utama	
Kepemimpinan Kota	5
Tata Kelola Kota	3
Urbanisasi dan Kependudukan	3
Perumahan dan Pemukiman	3
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	3
Kawasan Tepi Air	3
Transportasi Masal	4
Ekonomi Lokal dan Sektor Informal	2
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	6
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	2

#### **Neraca Daya Saing Daerah**

##### **Keunggulan/Advantage Berdasarkan Persepsi Masyarakat**

Variabel	Peringkat
Kepemimpinan Kota	
a. Koordinasi	3
Tata Kelola Kota	
a. Keberadaan lembaga keswadaayaan masyarakat	3
Urbanisasi dan Kependudukan	
a. Keberadaan dan peran kelembagaan	3
b. Upaya peningkatan kualitas SDM	1
Perumahan dan Pemukiman	

a.	Sarana lingkungan	1
Kawasan Tepi Air		
a.	Adanya ruang publik	5
b.	Bebas perumahan kumuh	2
Transportasi Masal		
a.	Angkutan umum	4
Ekonomi Lokal dan Sektor Informal		
a.	Pengembangan ekonomi lokal	2
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal		
a.	Perlindungan terhadap warisan budaya	4
<b>Kelemahan/ Disadvantage Berdasarkan Persepsi Masyarakat</b>		
Kepemimpinan		
a.	Kualitas	4
b.	Kedekatan	4
c.	Perubahan Ekonomi	5
d.	Perubahan Sosial Budaya	5
e.	Perubahan Fisik Lingkungan	5
Tata Kelola Kota		
a.	Perijinan	5
b.	Partisipasi Usulan	3
c.	Partisipasi Rancangan	3
d.	Partisipasi Pengadaan	4
e.	Partisipasi Pengawasan	4
Urbanisasi dan Kependudukan		
a.	Upaya pengendalian mobilitas penduduk	6
b.	Upaya pengendalian urbanisasi	5
c.	Pemukiman vertikal	6
Perumahan dan Pemukiman		
a.	Rumah tidak layak huni	6
b.	Rumah kumuh	6
c.	Air bersih dan layak minum	4

d.	Sanitasi lingkungan	5
e.	Sampah	4
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim		
a.	Tanggap darurat	4
Transportasi Masal		
a.	Fasilitas jalur sepeda	4
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka dan Kaerifan Lokal		
a.	Apresiasi terhadap warisan budaya	4
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi		
a.	Penggunaan tanaman hortikultura	3
b.	RTH yang terpelihara	5
<b>Keunggulan/Advantage Berdasarkan Data Obyektif</b>		
Tata Kelola Kota		
a.	Media Informasi dan komunikasi	2
b.	Keberagaman institusi partisipan	2
Urbanisasi dan Kependudukan		
a.	Keberadaan pengendalian mobilitas penduduk	2
b.	Pemenuhan tupoksi	3
c.	Penyediaan Ruang Daur Hidup	2
Perumahan dan Pemukiman		
a.	MBR yang menempati rumah layak	2
b.	MBR yang menerima kredit perumahan	2
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim		
a.	Jalur sepeda	3
b.	Budaya green	3
Kawasan Tepi Air		
a.	Pemanfaatan kegiatan publik	2
Ekonomi Lokal dan Sektoral		
a.	Keberadaan industri kecil	2
b.	Keberadaan ruang publik sektor informal	3
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi		

a.	Keberadaan komunitas hijau	3
c.	Eksistensi kebijakan	2

### **Kelemahan/ Disadvantage Berdasarkan Data Obyektif**

#### Kepemimpinan

a.	Visi	5
----	------	---

#### Resiko Bencana dan Perubahan Iklim

a.	Upaya Pengurangan emisi	5
----	-------------------------	---

#### Transportasi Masal

b.	Kendaraan tidak bermotor	5
----	--------------------------	---

#### Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal

c.	Eksistensi dan peran komunitas	6
d.	Peningkatan Ekonomi Lokal	6

### **5.4.5 Kabupaten Semarang**

	Peringkat Keseluruhan	5
--	-----------------------	---

#### Peringkat Menurut Indikator Utama

	Kepemimpinan Kota	4
--	-------------------	---

	Tata Kelola Kota	6
--	------------------	---

	Urbanisasi dan Kependudukan	4
--	-----------------------------	---

	Perumahan dan Pemukiman	6
--	-------------------------	---

	Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	5
--	------------------------------------	---

	Kawasan Tepi Air	6
--	------------------	---

	Transportasi Masal	5
--	--------------------	---

	Ekonomi Lokal dan Sektor Informal	4
--	-----------------------------------	---

	Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	4
--	---	---

	Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	6
--	---------------------------------------	---

### **Neraca Daya Saing Daerah**

### **Keunggulan/Advantage Berdasarkan Persepsi Masyarakat**

Variabel	Peringkat
----------	-----------

#### Kepemimpinan Kota

a.	Kedekatan	3
----	-----------	---

Tata Kelola Kota	
a. Perijinan	2
b. Partisipasi Pengadaan	3
c. Partisipasi Pengawasan	3
Urbanisasi dan Kependudukan	
a. Upaya pengendalian urbanisasi	4
Perumahan dan Pemukiman	
a. Bebas Rumah kumuh	3
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	
a. RTH yang terpelihara	3
<b>Kelemahan/ Disadvantage Berdasarkan Persepsi Masyarakat</b>	
Kepemimpinan	
a. Kualitas	5
b. Koordinasi	6
c. Perubahan Ekonomi	6
d. Perubahan Sosial Budaya	4
e. Perubahan Fisik Lingkungan	4
Tata kelola Kota	
a. Partisipasi Usulan	4
b. Partisipasi Rancangan	4
c. Keberadaan lembaga keswadaayaan masyarakat	5
Urbanisasi dan Kependudukan	
a. Kemudahan akses data kependudukan	5
b. Keberadaan dan peran kelembagaan	6
c. Upaya peningkatan kualitas SDM	5
d. Upaya pengendalian mobilitas penduduk	4
e. Pemukiman vertikal	4
Perumahan dan Pemukiman	
a. Rumah tidak layak huni	4
b. Air bersih dan layak minum	3
c. Sanitasi lingkungan	4

d.	Sampah	5
e.	Sarana lingkungan	5
Resiko Bencana Alam dan Perubahan Iklim		
a.	Tanggap darurat	3
Kawasan Tepi Air		
a.	Adanya ruang publik	6
b.	Bebas perumahan kumuh	6
Transportasi Masal		
a.	Fasilitas jalur sepeda	6
b.	Angkutan Masal	5
Ekonomi Lokal dan Sektor Informal		
a.	Pengembangan ekonomi lokal	5
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka dan Kearifan Lokal		
a.	Apresiasi terhadap warisan budaya	5
b.	Perlindungan terhadap warisan budaya	5
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi		
a.	Penggunaan tanaman hortikultura	6
<b>Keunggulan/Advantage Berdasarkan Data Obyektif</b>		
Kepemimpinan Kota		
a.	Visi	3
Urbanisasi dan Kependudukan		
a.	Keberadaan pengendalian mobilitas penduduk	4
b.	Pemenuhan tupoksi	2
c.	Penyediaan Ruang Daur Hidup	3
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim		
a.	Pengurangan emisi	4
Ekonomi Lokal dan Sektoral		
a.	Keberadaan industri kecil	4
b.	Keberadaan ruang publik sektor informal	2
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka dan Kearifan Lokal		
a.	Peningkatan ekonomi lokal	1

## **Kelemahan/ Disadvantage Berdasarkan Data Obyektif**

Tata Kelola Kota	
a. Media Informasi dan komunikasi	6
b. Keberagaman institusi partisipan	6
Perumahan dan Pemukiman	
a. MBR yang tempat tinggalnya layak huni	6
b. MBR yang memperoleh kredit	6
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	
a. Jalur sepeda	5
b. Budaya green	6
Kawasan Tepi Air	
a. Pemanfaatan kegiatan publik	6
Transportasi Masal	
a. Kendaraan tidak bermotor	4
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	
a. Eksistensi dan peran komunitas	5
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	
a. Keberadaan komunitas hijau	5
b. Eksistensi Kebijakan	4
<b>5.4.6 Kabupaten Demak</b>	
Peringkat Keseluruhan	6
Peringkat Menurut Indikator Utama	
Kepemimpinan Kota	6
Tata Kelola Kota	4
Urbanisasi dan Kependudukan	6
Perumahan dan Pemukiman	4
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	4
Kawasan Tepi Air	1
Transportasi Masal	3
Ekonomi Lokal dan Sektor Informal	6
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	1



Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi 4

### **Neraca Daya Saing Daerah**

#### **Keunggulan/Advantage Berdasarkan Persepsi Masyarakat**

Variabel Peringkat

Urbanisasi dan Kependudukan

a. Kemudahan akses data kependudukan 2

Kawasan Tepi Air

a. Bebas perumahan kumuh 3

Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal

a. Perlindungan terhadap warisan budaya 2

#### **Kelemahan/ Disadvantage Berdasarkan Persepsi Masyarakat**

Kepemimpinan Kota

a. Kualitas 6

b. Kedekatan 5

c. Koordinasi 4

d. Perubahan Ekonomi 4

e. Perubahan Sosial Budaya 6

f. Perubahan Fisik Lingkungan 6

Tata Kelola Kota

a. Perijinan 6

b. Partisipasi Usulan 6

c. Partisipasi Rancangan 5

d. Partisipasi Pengadaan 5

e. Partisipasi Pengawasan 5

f. Keberadaan lembaga keswadaayaan masyarakat 6

Urbanisasi dan Kependudukan

a. Keberadaan dan peran kelembagaan 5

b. Upaya peningkatan kualitas SDM 6

c. Upaya pengendalian mobilitas penduduk 5

d. Upaya pengendalian urbanisasi 6

e. Pemukiman vertikal 5

Perumahan dan Pemukiman	
a. Rumah tidak layak huni	5
b. Rumah kumuh	5
c. Air bersih dan layak minum	5
d. Sanitasi lingkungan	3
e. Sampah	6
f. Sarana lingkungan	6
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	
a. Tanggap darurat	6
Kawasan Tepi Air	
a. Adanya ruang publik	3
Transportasi Masal	
a. Fasilitas jalur sepeda	5
b. Angkutan umum	6
Ekonomi lokal dan Sektor Informal	
a. Pengembangan ekonomi lokal	6
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	
a. Apresiasi terhadap warisan budaya	6
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	
a. Penggunaan tanaman hortikultura	5
b. RTH yang terpelihara	6
<b>Keunggulan/Advantage Berdasarkan Data Obyektif</b>	
Tata Kelola Kota	
a. Keberagaman institusi partisipan	1
Perumahan dan Pemukiman	
a. MBR yang tempat tinggalnya layak huni	1
b. MBR yang mendapat kredit	3
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	
a. Pengurangan emisi	1
Transportasi masal	
a. Kendaraan tidak bermotor	2

Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka dan Kearifan Lokal	
a.	Eksistensi dan peran komunitas 2
b.	Peningkatan ekonomi lokal 2
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	
a.	Keberadaan komunitas hijau 2

### **Kelemahan/ Disadvantage Berdasarkan Data Obyektif**

Kepemimpinan	
a.	Visi 6
Tata Kelola Kota	
a.	Media Informasi dan komunikasi 5
Urbanisasi dan Kependudukan	
a.	Keberadaan pengendalian mobilitas penduduk 6
b.	Pemenuhan tupoksi 6
c.	Penyediaan ruang daur hidup 6
Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	
a.	Jalur sepeda 4
b.	Budaya green 4
Kawasan Tepi	
a.	Pemanfaatan kegiatan publik 4
Ekonomi Lokal dan Sektor Informal	
a.	Keberadaan industri kecil 5
b.	Keberadaan ruang publik sektor informal 6
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	
a.	Eksistensi dan peran komunitas 4
b.	Peningkatan ekonomi lokal 5
Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi	
a.	Eksistensi kebijakan 6

## **5.5 Kebijakan atas Dasar Hasil Analisis Neraca Daya Saing Daerah Berbasis Indeks Pembangunan Kota Berkelanjutan**

Rumusan kebijakan berkaitan hasil masing-masing neraca daya saing kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang didasarkan faktor disadvantage

baik dari persepsi masyarakat maupun dari data obyektif. Faktor keunggulan tiap kabupaten/kota dari persepsi masyarakat merupakan potensi yang baik yang dimiliki kabupaten/kota. Potensi ini kalau diikuti dengan keunggulan di data obyektif berarti memperoleh dukungan data, namun kalau keunggulan hanya berdasarkan persepsi masyarakat maka dukungan data yang harus ditingkatkan. Kebijakan yang harus dirumuskan di setiap kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Semarang adalah berdasarkan kelemahan (disadvantage) masing-masing variabel.

#### **5.5.1 Kota Semarang**

- a. Peningkatkan kuantitas dan kualitas media informasi dan komunikasi maupun keberagaman institusi partisipasi terutama persentase partisipasi wanita sebagai pemangku pemerintahan.
- b. Peremajaan, pembangunan kembali, dan pengembangan permukiman, dengan pendekatan berbasis kelembagaan masyarakat RT dan RW, sehingga komunitas lokal dapat berperan aktif.
- c. Peningkatkan keluarga MBR di rumah layak huni.
- d. Penyediaan jalur sepeda yang memadai dan mengatur kembali kepemilikan kendaraan motor dan mobil per kapita dengan sistem perpajakan.
- e. Peningkatan jumlah komunitas pecinta lingkungan, pelestari pusaka alam dan budaya yang aktif dan agen wisata yang menawarkan paket wisata terkait dengan warisan budaya, pusaka alam, dan kearifan lokal yang ada.

#### **5.5.2 Kabupaten Grobogan**

- a. Peningkatkan kuantitas dan kualitas media informasi dan komunikasi.
- b. peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (telekonferensi), pengorganisasian warga yang menempati area-area kritis dan perbatasan untuk berpartisipatif dalam pengawasan dan pengendalian tata ruang wilayah, peningkatan peran kelembagaan masyarakat RT dan RW.
- c. Penyediaan air bersih layak minum dan sanitasi lingkungan, peningkatan jumlah MBR yang memperoleh kredit perumahan.
- d. Peningkatan upaya pengurangan emisi, jalur sepeda dan budaya green

- e. Peningkatan jumlah ruang publik di kawasan tepi air dan bebas pemukiman kumuh.
- f. Peningkatan jumlah industri kreatif dan sektor informal.
- g. Perlindungan terhadap warisan budaya dan peningkatan peran komunitas pecinta lingkungan, agen wisata yang menawarkan paket wisata terkait dengan warisan budaya, pusaka alam, dan kearifan lokal yang ada.

### **5.5.3 Kota Salatiga**

- a. Peningkatan kepemimpinan kota yang visioner, lebih dekat dengan masyarakat, koordinasi antar dinas dan dampak perubahan ekonomi dalam pembangunan.
- b. Peningkatan keberagaman institusi partisipan terutama persentase partisipasi wanita sebagai pemangku pemerintahan.
- c. Peningkatan peran kelembagaan dan pengendalian mobilitas penduduk dalam kota.
- d. Penanganan sampah, peningkatan jumlah MBR yang layak huni dan berhak menerima kredit perumahan.
- e. Peningkatan pemahaman tanggap darurat.
- f. Peningkatan jumlah ruang publik di kawasan tepi air dan bebas pemukiman kumuh.
- g. Peningkatan agen wisata yang menawarkan paket wisata terkait dengan warisan budaya, pusaka alam, dan kearifan lokal yang ada.

### **5.5.4 Kabupaten Kendal**

- a. Peningkatan kualitas pimpinan yang visioner, jujur, adil dan bijaksana, dekat dengan masyarakat, berprestasi dan punya kinerja yang baik, perubahan bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan fisik.
- b. Peningkatan tata kelola kota dalam hal perijinan, partisipasi usulan, rancangan, pengadaan, pengawasan dan keterlibatan LSM/BKM.
- c. Peningkatan kemudahan akses data kependudukan, pengendalian mobilitas penduduk dalam dan luar kota, pengorganisasian pemukiman vertikal.
- d. Penanganan rumah tidak layak huni, kumuh, air bersih layak minum, sanitasi lingkungan dan sampah.

- e. Peningkatan pemahaman tanggap darurat dan upaya pengurangan emisi
- f. Penyediaan jalur sepeda yang memadai dan mengatur kembali kepemilikan kendaraan motor dan mobil per kapita.
- g. Peningkatan apresiasi terhadap warisan budaya, komunitas pecinta lingkungan, jumlah agen wisata yang menawarkan paket wisata terkait dengan warisan budaya, pusaka alam, dan kearifan lokal yang ada.
- h. Peningkatan jumlah kampung kota yang menggunakan tanaman hortikultura untuk pohon peneduh dan tersedianya RTH dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi yang terpelihara

#### **5.5.5 Kabupaten Semarang**

- a. Peningkatan kualitas pimpinan yang jujur, adil dan bijaksana, berprestasi dan punya kinerja yang baik, koordinasi antar dinas, perubahan bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan fisik.
- b. Peningkatan tata kelola kota dalam partisipasi usulan, peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (tele-konfrens), pengorganisasian warga yang menempati area-area kritis dan perbatasan untuk berperanserta dalam pengawasan dan pengendalian tata-ruang wilayah, peningkatan peran kelembagaan masyarakat RT dan RW.
- c. Peningkatan kemudahan akses data kependudukan, peran kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, pengendalian mobilitas penduduk dalam kota , pengorganisasian pemukiman vertikal.
- d. Penanganan rumah tidak layak huni, air bersih layak minum, sanitasi lingkungan, sampah dan sarana lingkungan, MBR yang berhak memperoleh kredit.
- e. Peningkatan pemahaman tanggap darurat, jalur sepeda dan budaya green
- f. Peningkatan jumlah ruang publik di kawasan tepi air dan bebas pemukiman kumuh.
- g. Pengaturan kembali kepemilikan kendaraan motor dan mobil per kapita.
- h. Pengembangan ekonomi lokal
- i. Peningkatan apresiasi dan perlindungan terhadap warisan budaya, komunitas pecinta lingkungan, jumlah agen wisata yang menawarkan paket

wisata terkait dengan warisan budaya, pusaka alam, dan kearifan lokal yang ada.

- j. Peningkatan jumlah kampung kota yang menggunakan tanaman hortikultura untuk pohon peneduh.

#### **5.5.5 Kabupaten Demak**

- a. Peningkatan kualitas pimpinan yang visioner, jujur, adil dan bijaksana, berprestasi dan punya kinerja yang baik, dekat dengan masyarakat, koordinasi antar dinas, perubahan bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan fisik.
- b. Peningkatan tata kelola kota dalam hal perijinan, partisipasi usulan, rancangan, pengadaan, pengawasan dan keterlibatan LSM/BKM, peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (tele-konfrens), pengorganisasian warga yang menempati area-area kritis dan perbatasan untuk berperanserta dalam pengawasan dan pengendalian tata-ruang wilayah, peningkatan peran kelembagaan masyarakat RT dan RW.
- h. Peningkatan , peran kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, pengendalian mobilitas penduduk dalam dan luar kota, pengorganisasian pemukiman vertikal.
- i. Penanganan rumah tidak layak huni, air bersih layak minum, sanitasi lingkungan, sampah dan sarana lingkungan.
- c. Peningkatan pemahaman tanggap darurat, jalur sepeda dan budaya green
- d. Peningkatan jumlah ruang publik di kawasan tepi air
- e. Pengembangan ekonomi lokal dalam bentuk industri kecil dan informal
- f. Peningkatan apresiasi dan perlindungan terhadap warisan budaya, komunitas pecinta lingkungan, jumlah agen wisata yang menawarkan paket wisata terkait dengan warisan budaya, pusaka alam, dan kearifan lokal .
- g. Peningkatan jumlah kampung kota yang menggunakan tanaman hortikultura untuk pohon peneduh dan tersedianya RTH dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi yang terpelihara

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab V dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator neraca daya saing dari sisi keunggulan adalah partisipasi pengadaan, pengawasan, kemudahan akses data kependudukan, kualitas SDM, pengendalian urbanisasi, pemenuhan tupoksi, penataan rumah kumuh, sarana lingkungan, pengembangan industri kecil dan sektor informal, pengurangan emisi, perlindungan terhadap warisan budaya. Dari sisi kelemahan Dampak perubahan ekonomi, penggunaan media informasi dan komunikasi, pengendalian penduduk dalam kota, penanganan air bersih, sanitasi, sampah, pemahaman tanggap darurat, penyediaan ruang publik, fasilitas jalur sepeda, peran komunitas peduli lingkungan dan agen wisata, penggunaan tanaman hortikultura sebagai pohon peneduh.
2. Kebijakan yang dirumuskan masing-masing kabupaten/kota diprioritaskan berdasarkan faktor kelemahan indikator indeks pembangunan berkelanjutan.

#### 6.2 Saran

1. Penyusunan neraca daya saing berdasarkan indeks pembangunan kota berkelanjutan di suatu wilayah harus dilakukan secara berkelanjutan. Asesmen ini dilakukan dengan mempertimbangkan ciri khas dan keunikan kebijakan yang diberlakukan setiap wilayah. Selain itu juga harus mempertimbangkan kondisi geografis dan iklim di daerah tersebut.
2. Diperlukan penelitian lanjutan yang mampu mengembangkan metode *regional landscape planning* yang lebih baik dengan mengintegrasikan berbagai macam disiplin dan perbedaan budaya antara masyarakat, dunia usaha, kebijakan dan ilmu pengetahuan serta pengaruhnya terhadap lingkungan



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P., Alisjahbana, A. S., Effendi, N. & Boediono, 2002. *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Ahmad, S. & Choi, M. J., 2010. Urban India And Climate Change: Mitigation Strategies Towards Inclusive Growth. *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, 6(15), pp. 60-73.
- Badan Pusat Statistik, 2000. *Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Karakteristik Tujuh Wilayah Aglomerasi Perkotaan di Indonesia 1990 – 1995*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2011. *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cho, S.-H., Omitaomu, O. A., Paudyal, N. C. & Eastwood, D. B., 2007. The impact of an Urban Growth Boundary on Land Development in Knox County, Tennessee : A Comparison of Two Stage Probit Least Squares and Multilayer Neural Network Models. *Journal of Agricultural and Applied Economic*, 39(3), pp. 701-717.
- Coles, F. J., Cuffney, F. T., McMahan, G. & Rosin, C. J., 2010. Judging a Brook by its Cover: The Relation Between Ecological Condition of a Stream and Urban Land Cover in New England. *Northeastern Naturalist*, 17(1), pp. 29-48.
- Cracolici, M. F., Cuffaro, M. & Nijkamp, P., 2010. The Measurement of Economic, Social and environmental Performances of Countries: a Novel Approach. *Soc Indic Res*, Volume 95, p. 339–356.
- Dijk, M. P. v. & Mingshun, Z., 2005. Sustainability indices as a tool for urban managers, evidence from four medium-sized Chinese cities. *Environmental Impact Assessment Review*, Volume 25, pp. 667-688.
- Dutt, K., 2009. Governance, institutions and the environment-income relationship: a cross-country study. *Environ Dev Sustain*, Volume 11, p. 705–723.
- Fan, P. & Qi, J., 2010. Assessing the sustainability of major cities in China. *Sustain Sci*, Volume 5, pp. 51-68.
- Fauzi, A. & Oxtavianus, A., 2014. The Measurement of Sustainable Development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), pp. 68-83.
- Hidayat, P., 2012. Analisis Daya Saing Ekonomi Kota Medan. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 4(3), pp. 228-238.
- Huda, M. & Santoso, E. B., 2014. Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Potensi Daerahnya. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2), pp. 81-86.

- Irawati, I., Zulfadly, Z. & Isai, R. E., 2012. Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Serta Variabel Sumber Daya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. *J@TI Undip*, 7(1), pp. 43-50.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2012. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2011*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Khatun, T., 2009. Measuring environmental degradation by using principal component analysis. *Environ Dev Sustain*, Volume 11, p. 439–457.
- Lee, Y.-J. & Huang, C.-M., 2007. Sustainability Index for Taipei. *Environmental Impact Assesment Review*, Volume 27, pp. 505-521.
- Ma, M., Lu, Z. & Sun, Y., 2008. Population Growth, Urban Sprawl and Landscape Integrity of Beijing City. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, Volume 15, pp. 326-330.
- McCarthy, M. P., Best, M. J. & Betts, R. A., 2010. Climate change in cities due to global warming and urban effects. *GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS*, Volume 37, pp. 1-5.
- Oleyar, M. D., Greve, A. I., Withey, J. C. & Bjorn, A. M., 2008. An Integrated Approach to Evaluating Urban Forest Functionality. *Urban Ecosyst*, pp. 289-308.
- Pujiati, A., 2013. *Publikasi Kota Hijau: Sarana Promosi Daerah*. Yogyakarta, UII.
- Pujiati, A., Santosa, P. B., Sarungu, J. & Soesilo, A., 2013. The Determinants of Green and Non Green City: An Empirical Research in Indonesia. *American International Journal of Contemporary Research*, 3(8), pp. 83-94.
- Roback, J., 1982. Wages, Rents, and the Quality of Life. *Journal Of Political Economy*, 90(6), pp. 1257-1278.
- SUD, F. I., 2013. *Proses Perhitungan Indeks Pembangunan Kota Berkelanjutan*, Batam: SUD-FI.
- Todaro, M. & Smith, 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Kesembilan penyunt. Jakarta: Erlangga.
- Xiao, G., Xue, L. & Woetzel, J., 2010. *The Urban Sustainability Index: A New Tool for Measuring China's Cities*, Shanghai: A joint initiative of Columbia University, Tsinghua University, and McKinsey & Company.
- Zheng, S., Kahn, M. E. & Liu, H., 2010. Towards a system of open cities in China: Home prices, FDI flows and air quality in 35 major cities. *Regional Science and Urban Economics*, Volume 40, pp. 1-10.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat),  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089  
Laman: <http://lp2m.unnes.ac.id> Surel: [lp2m@mail.unnes.ac.id](mailto:lp2m@mail.unnes.ac.id)

**KONTRAK PENELITIAN**  
**Penelitian Fundamental**  
**Tahun Anggaran 2017**  
**Nomor: 1748/UN37.3.1/LT/2017**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **April** tahun **Dua ribu tujuh belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Amin Pujiati S.E.,M.Si** : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Fundamental Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Fundamental Tahun Anggaran 2017 dengan judul "MODEL NERACA DAYA SAING DAERAH BERBASIS INDEKS PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN".

**Pasal 2**  
**Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 83.629.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, tanggal 07 Desember 2016.